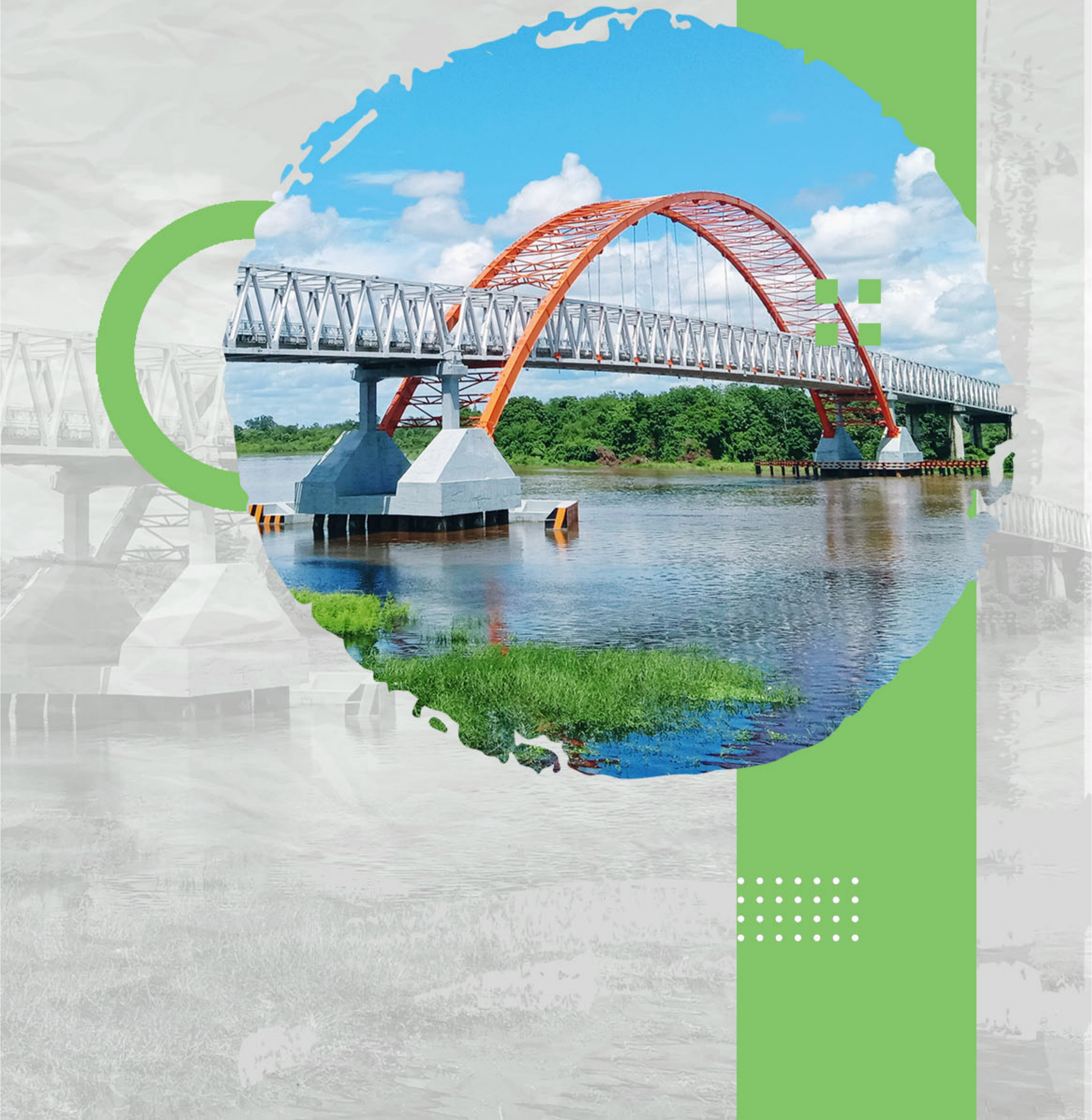


**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

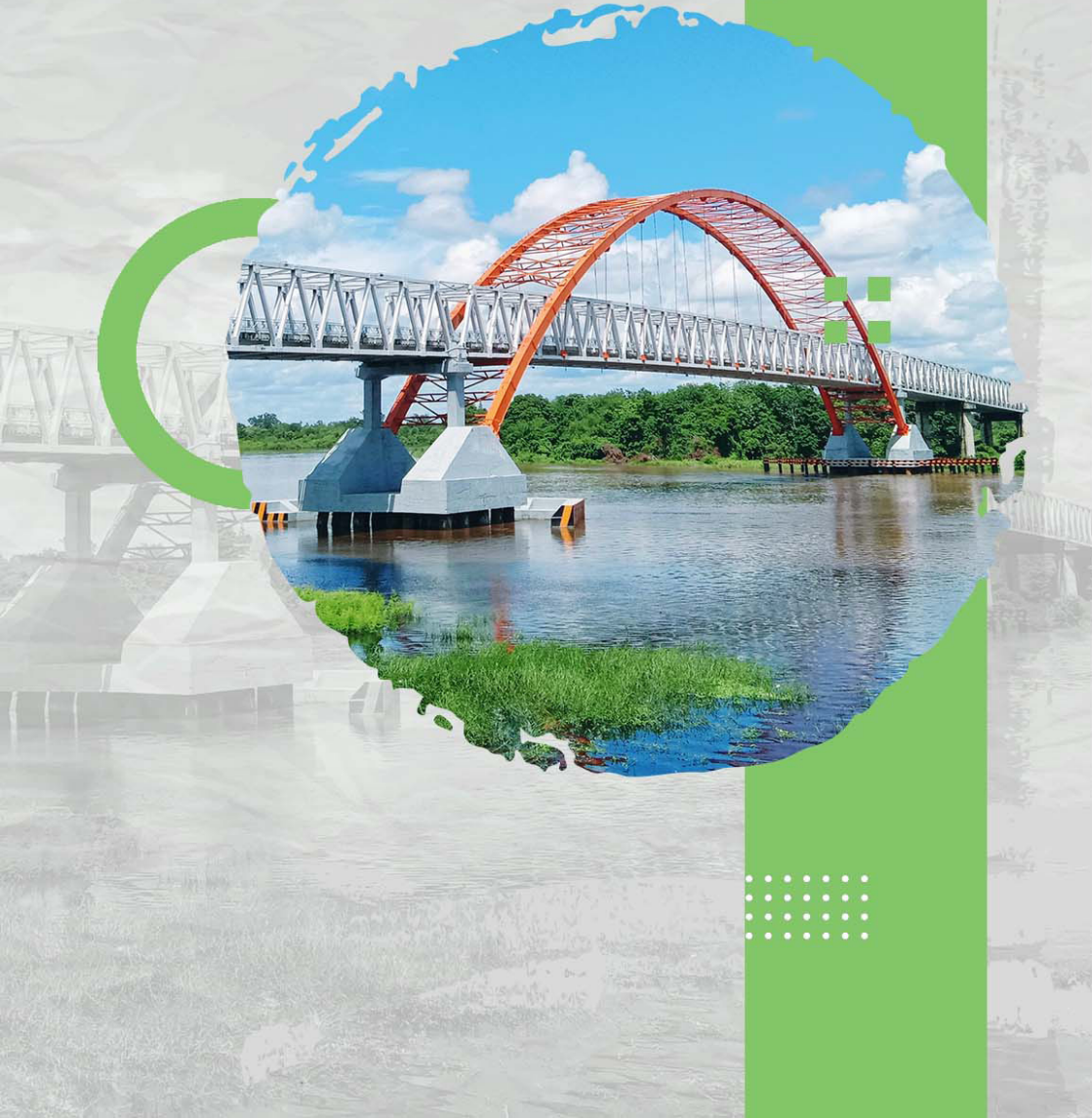
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





Peta Pembinaan Provinsi Kalimantan Tengah

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Alvian Imron Rosadi, S.Stat
2. Drs. Awan Yanuarko, M.Si

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	2

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

A. KABUPATEN BARITO SELATAN	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	5
Aspek Satuan Inovasi Daerah	6
B. KABUPATEN BARITO TIMUR	10
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	11
Aspek Satuan Inovasi Daerah	12
C. KABUPATEN BARITO UTARA	17
D. KABUPATEN GUNUNG MAS	17
E. KABUPATEN KAPUAS	17
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	17
Aspek Satuan Inovasi Daerah	18
F. KABUPATEN KATINGAN	24
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	25
Aspek Satuan Inovasi Daerah	25
G. KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	31
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	31
Aspek Satuan Inovasi Daerah	32
H. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	38
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	39
Aspek Satuan Inovasi Daerah	39
I. KABUPATEN LAMANDAU	45
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	46
Aspek Satuan Inovasi Daerah	46
J. KABUPATEN MURUNG RAYA	52
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	52
Aspek Satuan Inovasi Daerah	53
K. KABUPATEN PULANG PISAU	59
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	60
Aspek Satuan Inovasi Daerah	60

L. KABUPATEN SERUYAN	65
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	66
Aspek Satuan Inovasi Daerah	66
M. KABUPATEN SUKAMARA	72
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	73
Aspek Satuan Inovasi Daerah	73
N. KABUPATEN PALANGKA RAYA	79
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	80
Aspek Satuan Inovasi Daerah	81
BAB III REKOMENDASI KEBIJAKAN	88

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 01. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Barito Selatan
- Gambar 02. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Barito Selatan
- Gambar 03. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Barito Selatan
- Gambar 04. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Barito Selatan
- Gambar 05. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Barito Selatan
- Gambar 06. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Barito Selatan
- Gambar 07. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Barito Selatan
- Gambar 08. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Barito Selatan
- Gambar 09. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Barito Selatan
- Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan
- Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Barito Timur
- Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Barito Timur
- Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Barito Timur
- Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Barito Timur
- Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Barito Timur
- Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Barito Timur
- Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Barito Timur
- Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Barito Timur

Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Barito Timur

Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barito Timur

Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kapuas

Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kapuas

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kapuas

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kapuas

Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kapuas

Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kapuas

Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kapuas

Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kapuas

Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kapuas

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas

Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Katingan

Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Katingan

Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Katingan

Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Katingan

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Katingan

Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Katingan

Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Katingan

Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Katingan

Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Katingan

Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Katingan

Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lamandau

Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lamandau

Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Lamandau

Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Lamandau

Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Lamandau

Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Lamandau

Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Lamandau

Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Lamandau

Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Lamandau

Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lamandau

Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Murung Raya

Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Murung Raya

Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Murung Raya

Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Murung Raya

Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Murung Raya

Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Murung Raya

Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Murung Raya

Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Murung Raya

Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Murung Raya

Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya

Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pulang Pisau

Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pulang Pisau

Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Pulang Pisau

Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pulang Pisau

Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pulang Pisau

Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Pulang Pisau

Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Pulang Pisau

Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pulang Pisau

Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Pulang Pisau

Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Seruyan

Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Seruyan

Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Seruyan

Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Seruyan

Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Seruyan

Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Seruyan

Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Seruyan

Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Seruyan

Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Seruyan

Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan

Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 111. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sukamara

Gambar 112. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sukamara

Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sukamara

Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sukamara

Gambar 115. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sukamara

Gambar 116. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sukamara

Gambar 117. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Sukamara

Gambar 118. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sukamara

Gambar 119. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sukamara

Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sukamara

Gambar 121. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 122. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Palangka Raya

Gambar 123. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Palangka Raya

Gambar 124. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Palangka Raya

Gambar 125. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Palangka Raya

Gambar 126. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Palangka Raya

Gambar 127. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Palangka Raya

Gambar 128. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Palangka Raya

Gambar 129. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Palangka Raya

Gambar 130. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Palangka Raya

Gambar 131. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Palangka Raya

Gambar 132. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Barito Selatan beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Barito Timur beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Kapuas beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Katingan beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Kotawaringin Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Kotawaringin Timur beserta Skor Kematangannya

Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Lamandau beserta Skor Kematangannya

Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Murung Raya beserta Skor Kematangannya

Tabel 10. Daftar Inovasi Kabupaten Pulang Pisau beserta Skor Kematangannya

Tabel 11. Daftar Inovasi Kabupaten Seruyan beserta Skor Kematangannya

Tabel 12. Daftar Inovasi Kabupaten Sukamara beserta Skor Kematangannya

Tabel 13. Daftar Inovasi Kabupaten Kapuas beserta Skor Kematangannya



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelembagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara

kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan,

Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, dan Kota Palangka Raya.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
		Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian
	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	
	Roadmap SiDA	
	SDM	Nilai IPM
		Penghargaan Bagi Inovator
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
		Kecepatan Inovasi

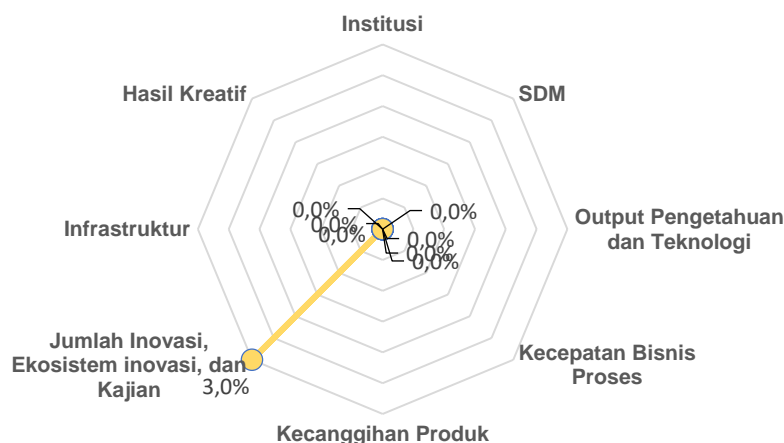
ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah



BAB I

PENDAHULUAN

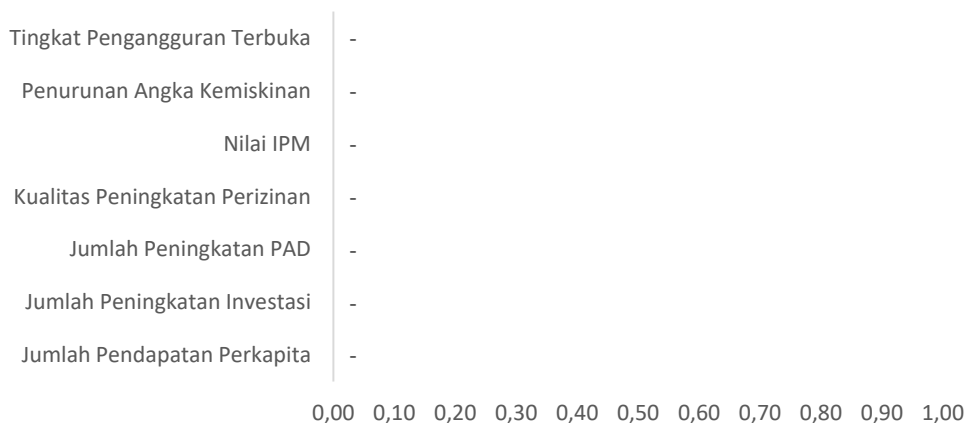
A. KABUPATEN BARITO SELATAN



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Barito Selatan memiliki keunggulan pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian namun hanya sebesar 3%. Sedangkan untuk variabel lain data skor tidak tersedia.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

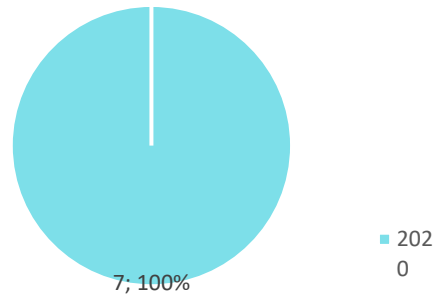


Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Barito Selatan

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Barito Selatan tidak mengisi Aspek Satuan Pemerintah Daerah, sehingga datanya tidak tersedia.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

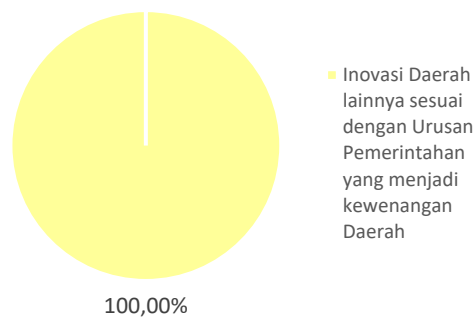
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Barito Selatan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Barito Selatan hanya pada tahun 2020, yaitu sebanyak 7 inovasi.

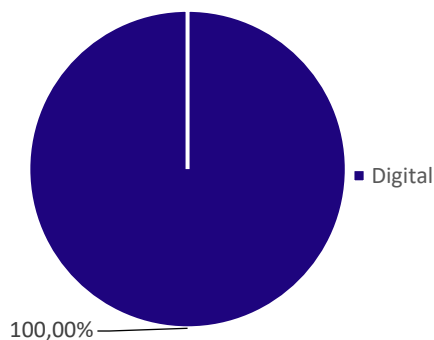
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan bentuk inovasi, seluruh inovasi pada Kabupaten Barito Selatan, yaitu sebanyak 7 (100%) inovasi merupakan inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Barito Selatan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, seluruh inovasi daerah, yaitu 7 inovasi yang dilaporkan Kabupaten Barito Selatan merupakan inovasi digital.

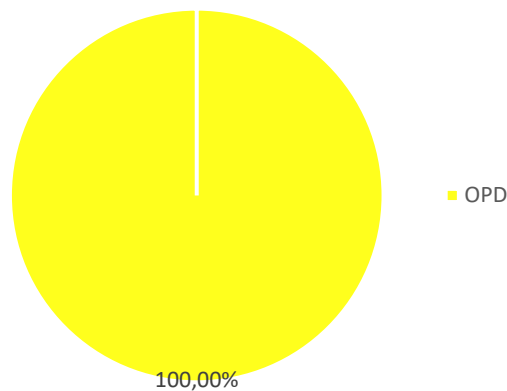
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Barito Selatan

Secara umum jumlah inovasi pada Kabupaten Barito Selatan tidak bisa dikatakan mengalami penurunan maupun peningkatan, karena data yang tersedia hanya data inovasi pada tahun 2020, yaitu inovasi jenis digital.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Barito Selatan

Seluruh inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 7 (100%) inovasi. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

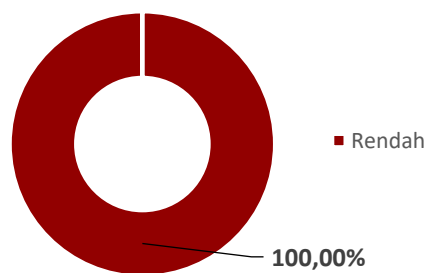
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Barito Selatan

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Barito Selatan berdasarkan urusan pemerintahan seluruhnya adalah pada urusan kesehatan, yaitu sebanyak 7 inovasi.

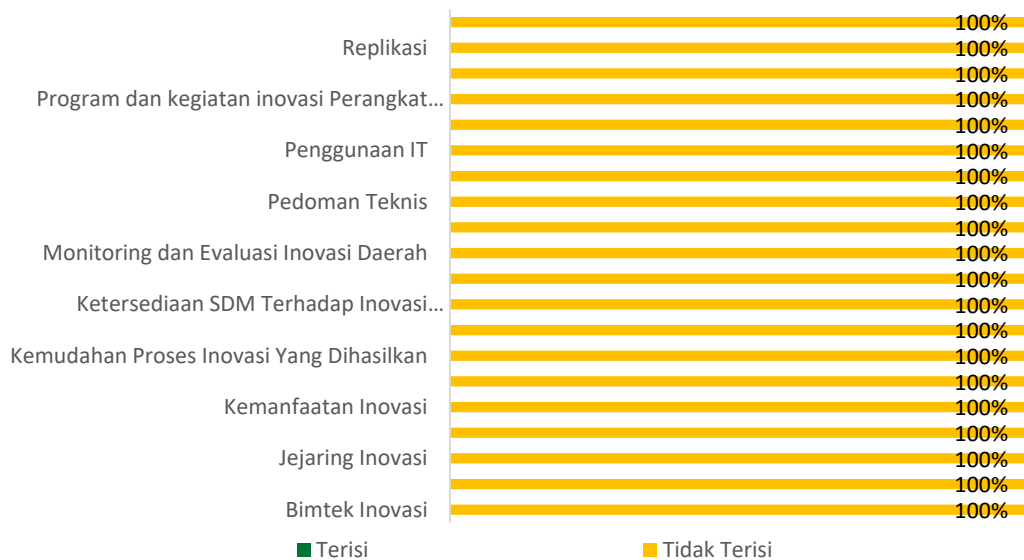
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Barito Selatan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi berjumlah 7 (100%) memiliki skor rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

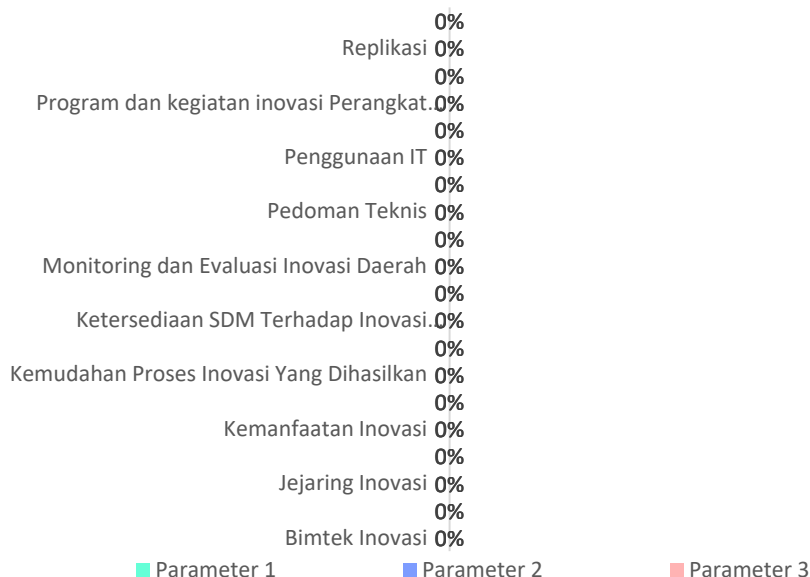
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Dari 7 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Barito Selatan, data pendukung pada semua indikator tidak terisi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

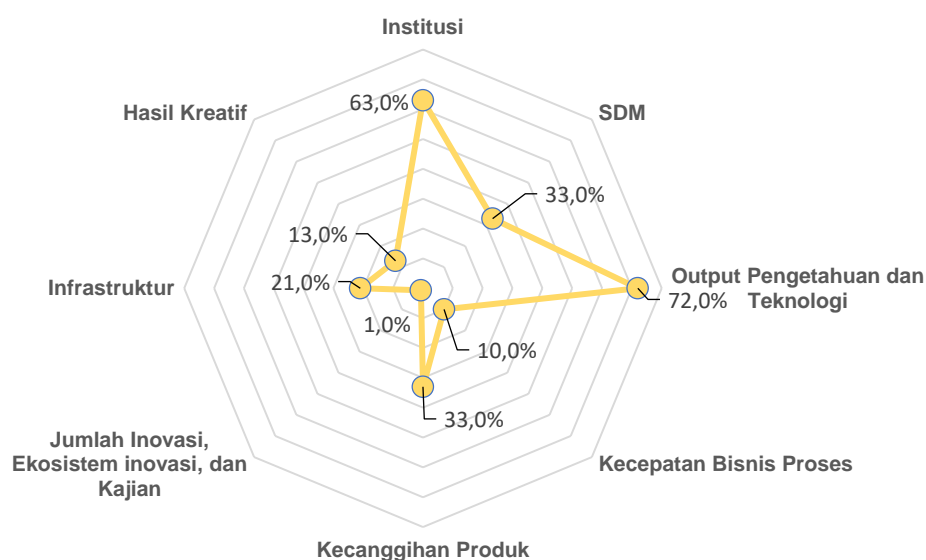
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah pada Kabupaten Barito Selatan bahwa data keterisian untuk setiap parameter tidak tersedia.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Barito Selatan beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Barito Selatan beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Transportasi Umum	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Modern	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Restoran	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Tempat Wisata	0

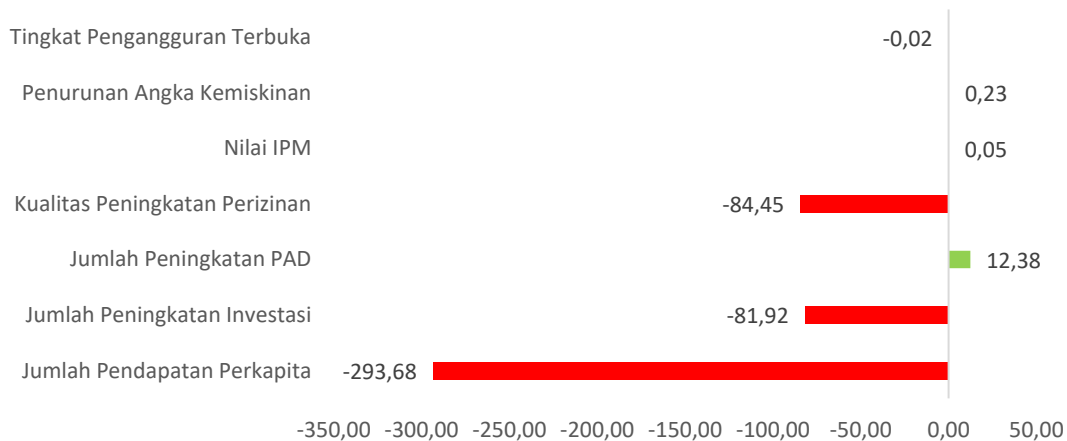
B. KABUPATEN BARITO TIMUR



Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Barito Timur memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 72.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 1.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



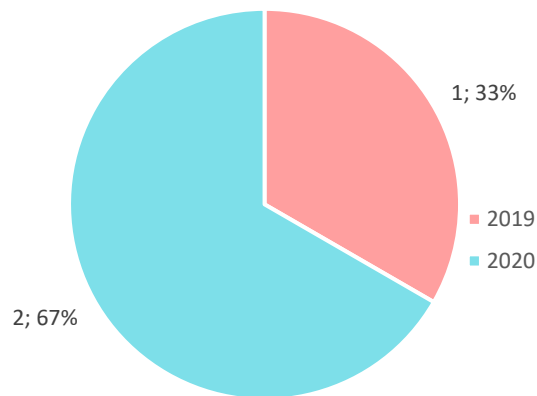
Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Barito Timur

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Barito Timur belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.02%, dimana nilai tersebut masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.23%, angka tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya naik 0.02%. Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.05% dimana nilai tersebut sudah melebihi standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap, meskipun tidak signifikan. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 84.45%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengalami penurunan sangat signifikan pada Jumlah Pendapatan Perkapita sebesar -293.68%, hal ini memerlukan perhatian yang sangat serius. Sedangkan indikator Jumlah Peningkatan Investasi justru mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 81.92% sedangkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, indikator Peningkatan PAD pada Kabupaten Barito Timur menunjukkan kenaikan sebesar 12.38%, nilai tersebut sudah melebihi dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

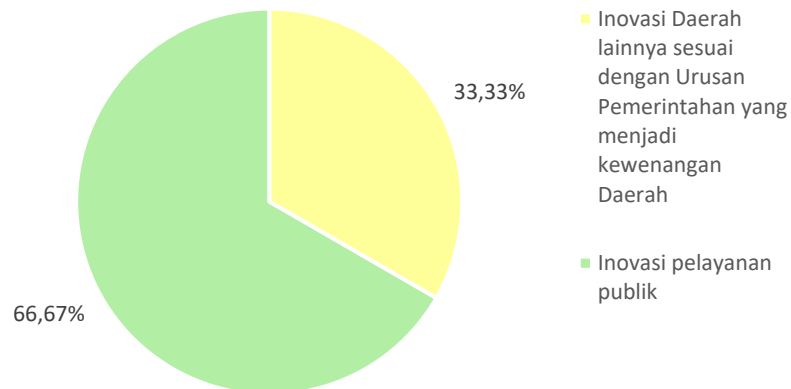
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Barito Timur

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Barito Timur telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 1 (33,33%) inovasi yang diterapkan sejak tahun 2019 dan 2 (66,67%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

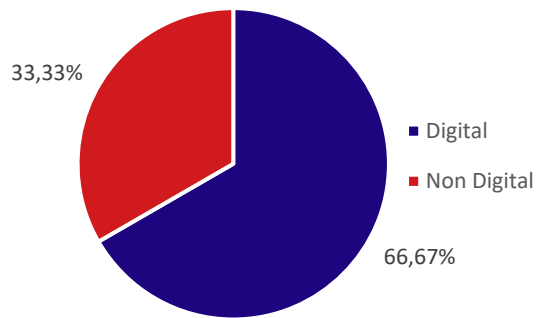
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inova pada Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Barito Timur, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sementara inovasi bentuk lainnya belum dilaporkan. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 2 (66.67%) inovasi dan sisanya adalah 1 (33.33%) inovasi.

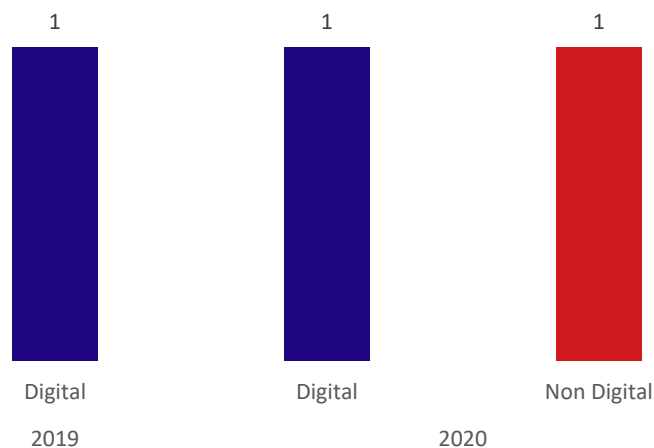
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Barito Timur

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 2 (66.67%) dari 3 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Barito Timur merupakan inovasi digital dan 1 (33.33%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

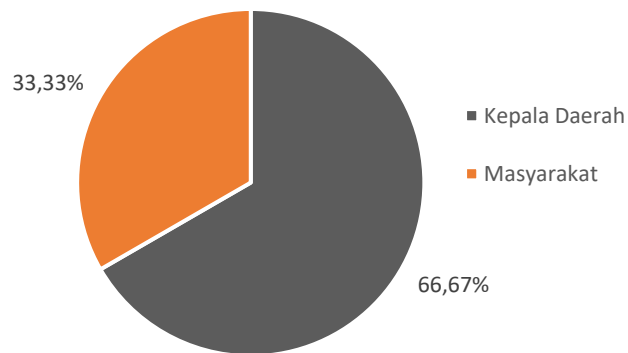
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Barito Timur

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu mengalami penambahan pada inovasi non digital. Sebelumnya pada tahun 2019 hanya ada 1 inovasi yang merupakan inovasi digital.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Barito Timur

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Barito Timur pada tahun 2021 diinisiasi oleh kepala daerah, yaitu sejumlah 2 (66,67%) inovasi sementara 1 (33,33%) sisanya lainnya diinisiasi oleh masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD, dan OPD belum dilaporkan di tahun 2021.

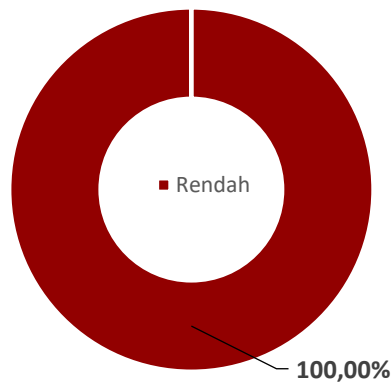
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Barito Timur

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Barito Timur berdasarkan urusan pemerintahan cukup bervariasi. Dapat dilihat bahwa urusan inovasi pada Kabupaten Barito Timur yaitu pada urusan perencanaan, perdagangan, dan penanaman modal.

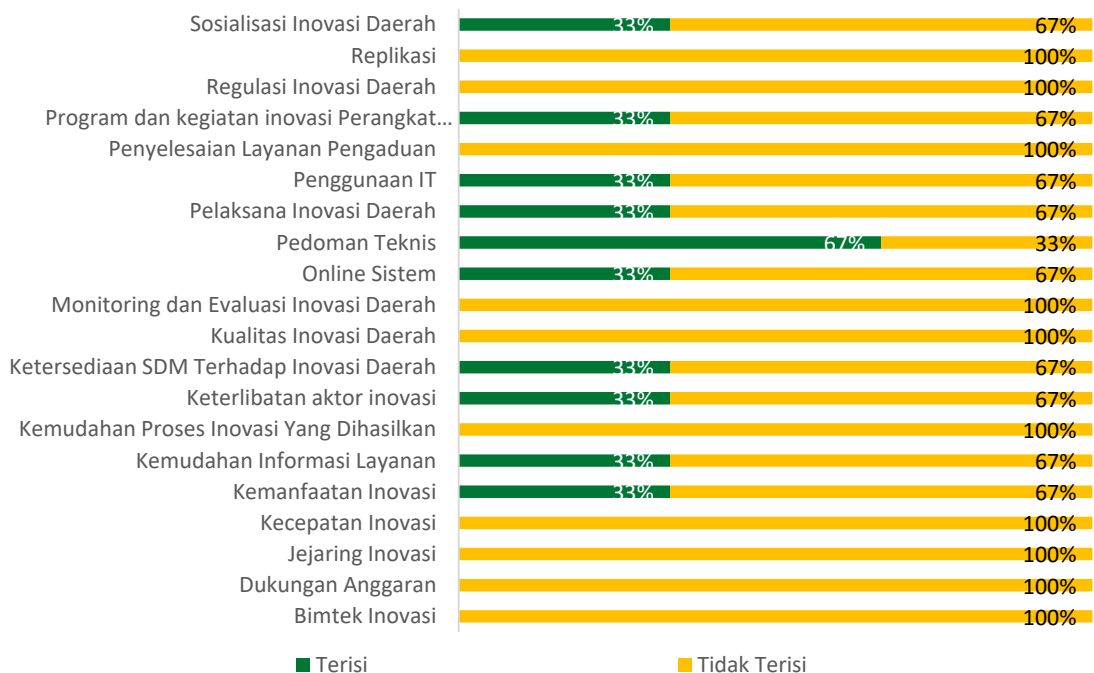
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Barito Timur

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi pada Kabupaten Barito tergolong masih rendah.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

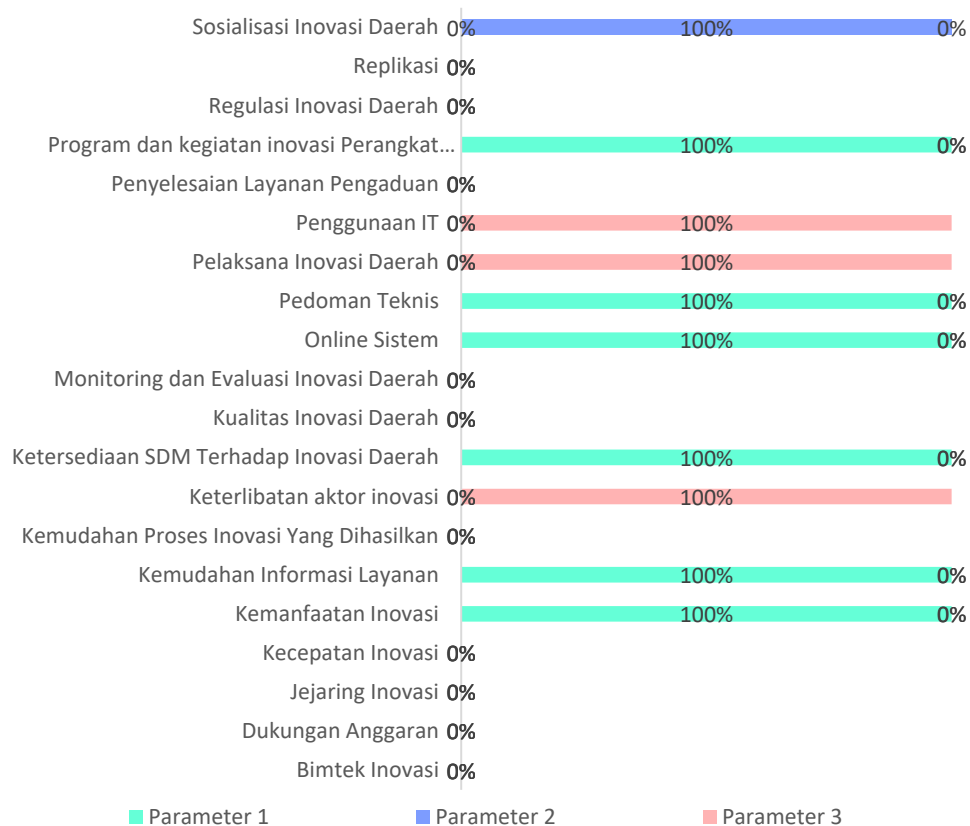


Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barito Timur

Dari 3 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Barito Timur, rata-rata evidence untuk inovasi yang dilaporkan masih banyak kekurangan dan masih banyak yang belum terisi, seperti indikator Replikasi, Regulasi Inovasi Daerah, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi yang

Dihasilkan, Kecepatan Inovasi, Jejaring Inovasi, Dukungan Anggaran, dan Bimtek Inovasi. Hanya ada beberapa indikator yang sudah terisi dan belum lengkap.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi pada indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Pedoman Teknis, Online Sistem, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, dan Kemanfaatan Informasi. Artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter pertama. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) ada pada Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, dan Keterlibatan Aktor Inovasi sebesar 100%.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Barito Timur beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Barito Timur beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Pasar Toemenggong Djajakarti	0
SI PERIBO BARTIM (Sistem Informasi Perijinan Berusaha Online)	2
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)	26

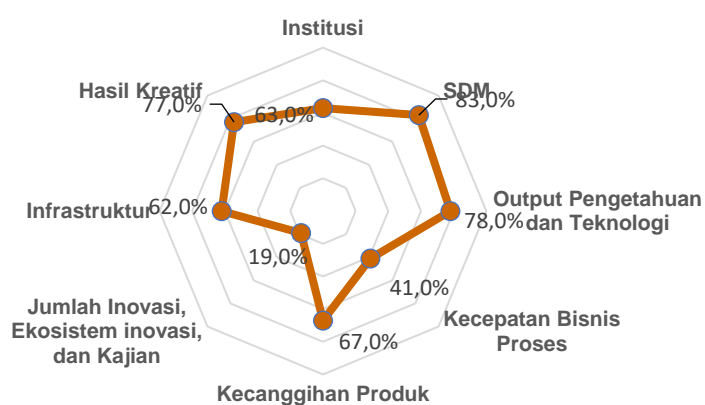
C. KABUPATEN BARITO UTARA

(Tidak ada inovasi yang memenuhi syarat untuk dinilai pada tahun pelaporan 2021)

D. KABUPATEN GUNUNG MAS

(Tidak ada inovasi yang memenuhi syarat untuk dinilai pada tahun pelaporan 2021)

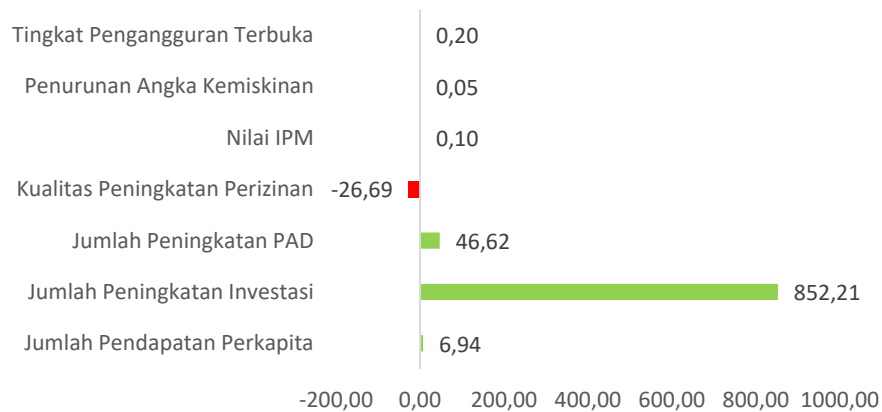
E. KABUPATEN KAPUAS



Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kapuas

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kapuas memiliki keunggulan pada variabel SDM, yaitu sebesar 83.0%, disusul oleh variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sebesar 78.0% dan Hasil Kreatif sebesar 77.0%. Sementara persentase terkecil ada pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

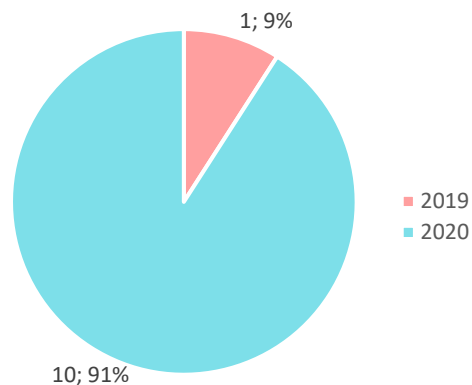


Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kapuas

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan sangat signifikan pada aspek Jumlah Peningkatan Investasi sebesar 852.21%, ini merupakan peningkatan yang sangat besar. Sedangkan peningkatan pada aspek lain yang cukup signifikan yaitu pada Jumlah Peningkatan PAD sebesar 46.62%, Jumlah Pendapatan Perkapita naik sebesar 6.94%, dan aspek lain tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk Kualitas Peningkatan Perizinan justru mengalami penurunan sebesar 26.69%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

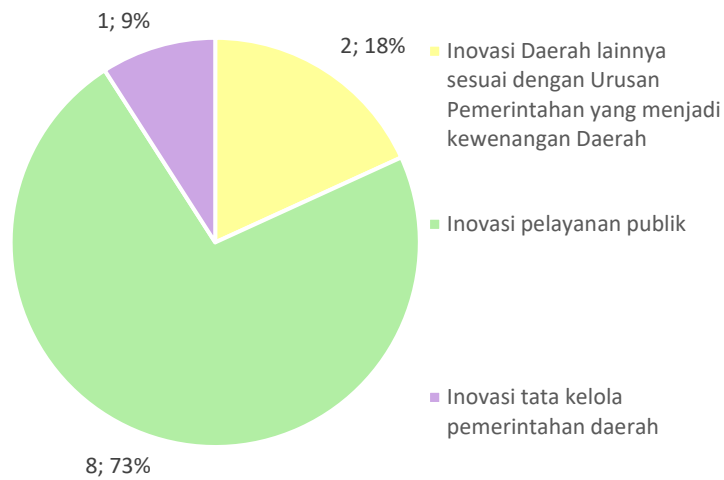
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kapuas

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kapuas telah ditetapkan sejak tahun 2019. Terdapat 10 (90.91%) inovasi dari 11 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 1 (9.09%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019. Artinya, terjadi peningkatan inovasi yang cukup signifikan pada Kabupaten Kapuas.

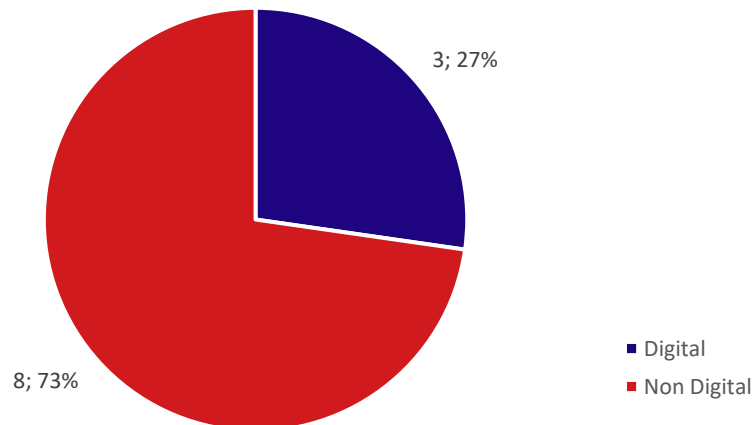
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kapuas

Berdasarkan bentuk inovasi, seluruh inovasi pada Kabupaten Kapuas, dapat dilihat bahwa bentuk inovasi terbanyak merupakan inovasi pelayanan publik, sebanyak 8 (72.73%) inovasi, sedangkan Inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berjumlah 2 (18.18%) inovasi, dan hanya 1 (9.09%) inovasi tata Kelola pemerintahan daerah.

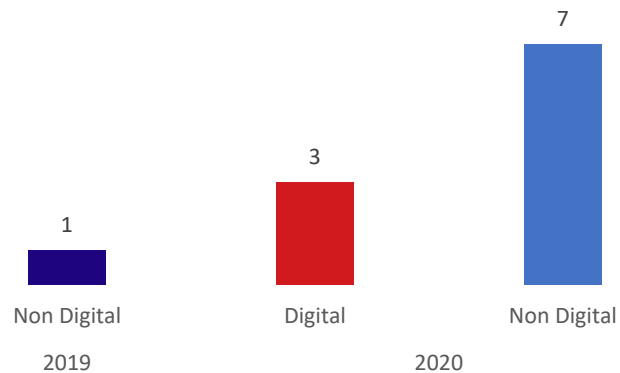
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kapuas

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, dari seluruh inovasi daerah yang dilaporkan, sebanyak 8 (72.73%) inovasi merupakan inovasi non digital. Sedangkan sisanya sebanyak 3 (27.27%) inovasi merupakan inovasi digital. Artinya, di Kabupaten Kapuas jenis inovasi masih didominasi oleh inovasi non digital.

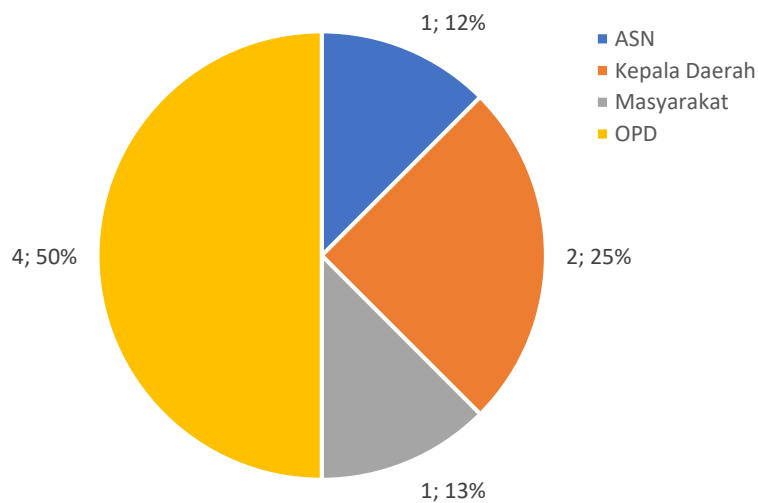
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kapuas

Secara umum jumlah inovasi pada Kabupaten Kapuas dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah inovasi hanya berjumlah 1 yang merupakan inovasi non digital. Sedangkan di tahun berikutnya yaitu tahun 2020 jumlah inovasi mengalami penambahan cukup signifikan yaitu sebanyak 10 inovasi, yang 3 diantaranya merupakan inovasi digital.

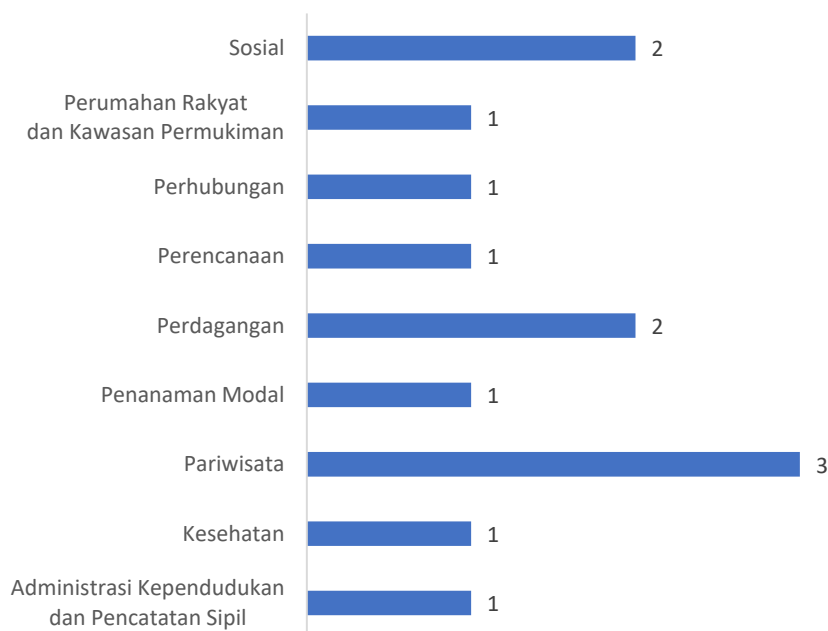
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kapuas

Seluruh inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kapuas pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh Kepala Daerah, yaitu sejumlah 7 (63.64%) inovasi. Sedangkan sebanyak 3 (27.27%) inovasi diinisiasi oleh OPD, dan hanya 1 (9.09%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat.

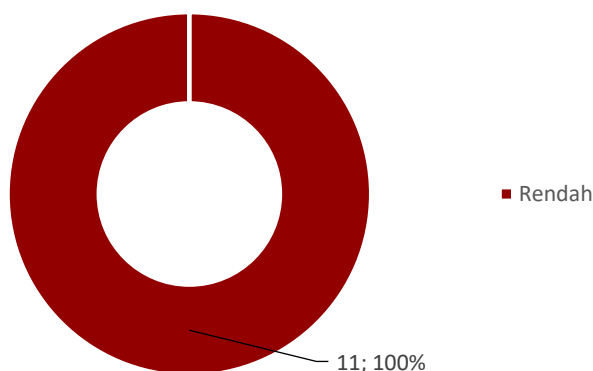
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kapuas

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Kapuas berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yaitu 1 inovasi, kecuali pada urusan Pariwisata yaitu sebanyak 3 inovasi. Sedangkan untuk urusan Sosial dan Perdagangan masing-masing sebanyak 2 inovasi.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

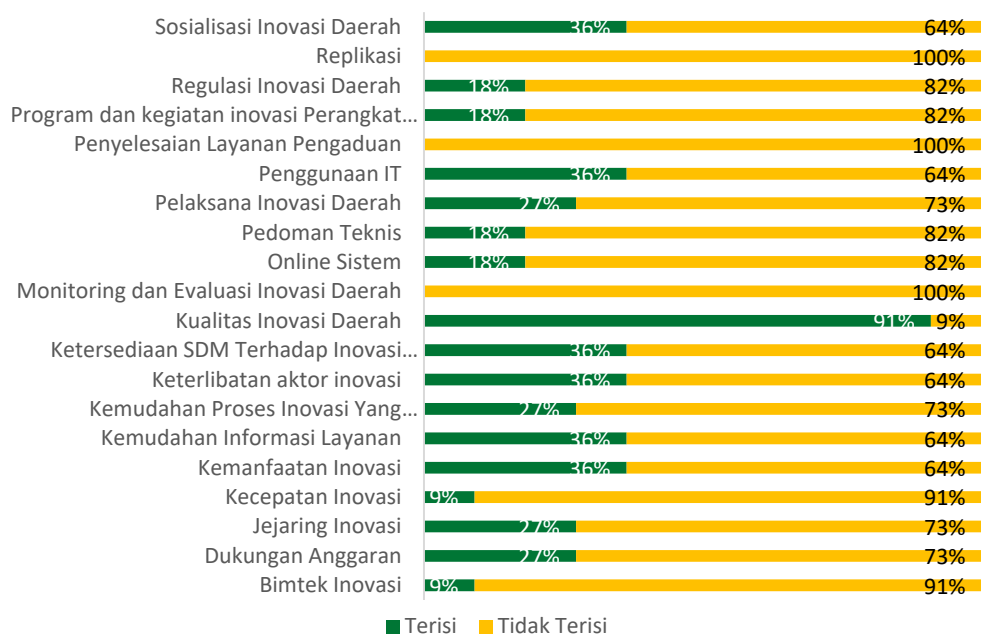


Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kapuas

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kapuas, yaitu berjumlah 11 (100%) memiliki skor rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor

sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

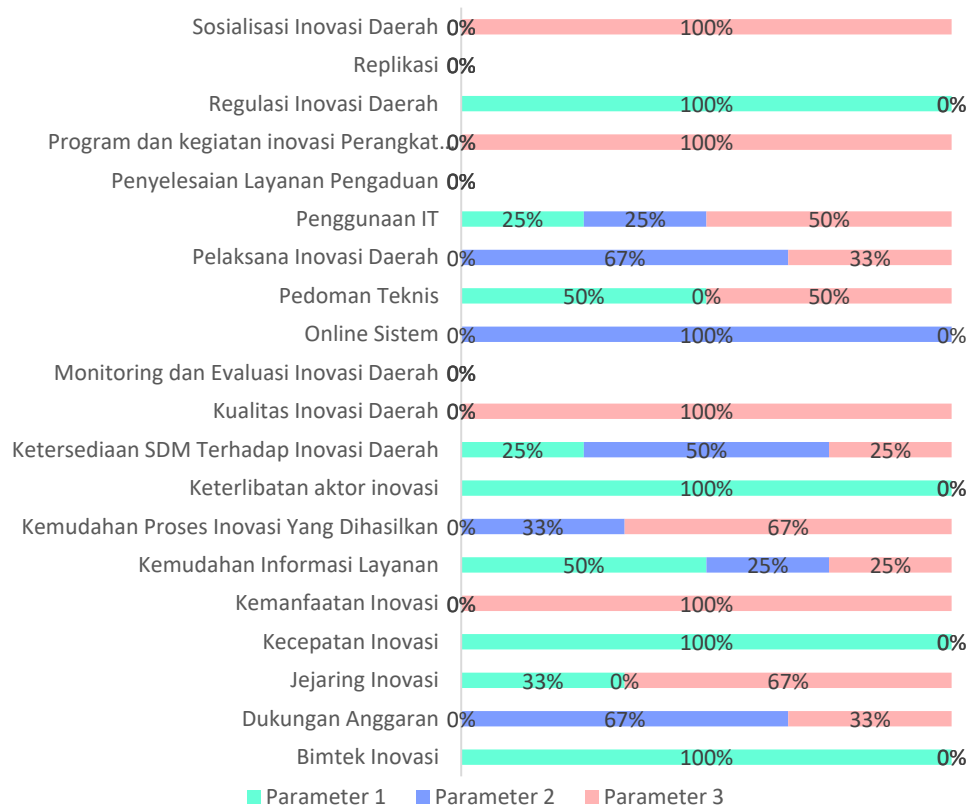
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas

Dari 11 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kapuas, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukungnya pada indikator Kualitas Inovasi Daerah, yaitu sebesar 91%. Sedangkan rata-rata data pendukung yang tidak terisi yaitu pada indikator Replikasi, Penyelesaian Layanan Pengaduan, dan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah yang masing-masing persentase tidak terisi sebesar 100%.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah pada Kabupaten Kapuas bahwa tingkat keterisian paling banyak (termasuk dalam parameter 3) yaitu pada indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Kualitas Inovasi Daerah, dan Kemanfaatan Inovasi. Sedangkan indikator yang termasuk dalam tingkat keterisian parameter 2 terbesar adalah Online sistem, yaitu 100%. Lalu untuk tingkat keterisian yang termasuk parameter 1 yang terbesar yaitu pada indikator Regulasi Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kecepatan Inovasi, dan Bimtek Inovasi yang masing-masing sebesar 100%.

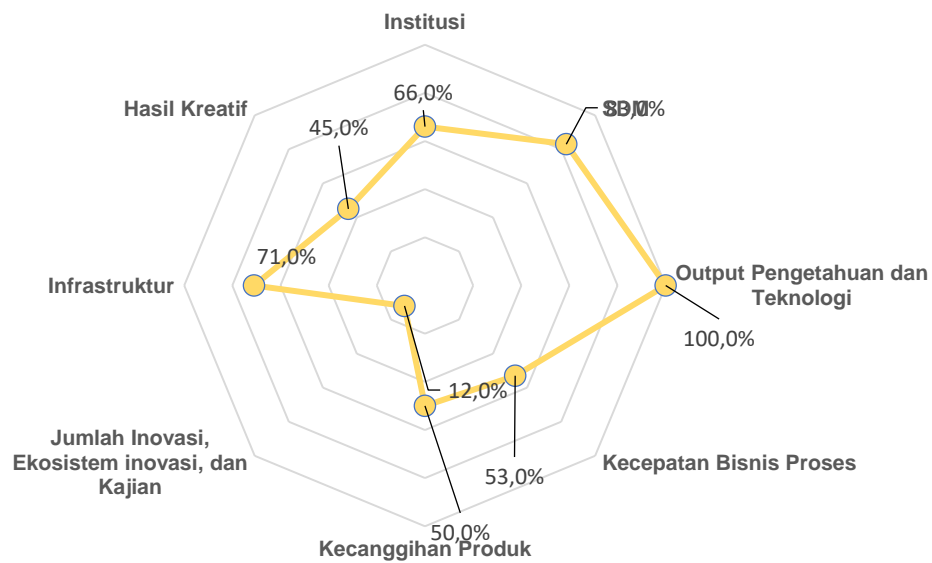
j. Daftar Inovasi Kabupaten Kapuas beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Kapuas beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Modern	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Restoran	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 pada Sektor Transportasi (Feri Penyeberangan)	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Tempat	15

Wisata	
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel	15
SIMPUN (SINDE MUHUN PELAYANAN URAS DINUN) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	15
TAGANA Penanganan Pemakaman Jenazah Covid-19	15
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAERAH (SIPD) BAPPEDA KABUPATEN KAPUAS	0
RUMAH KARANTINA PENANGANAN PASIEN COVID-19	15

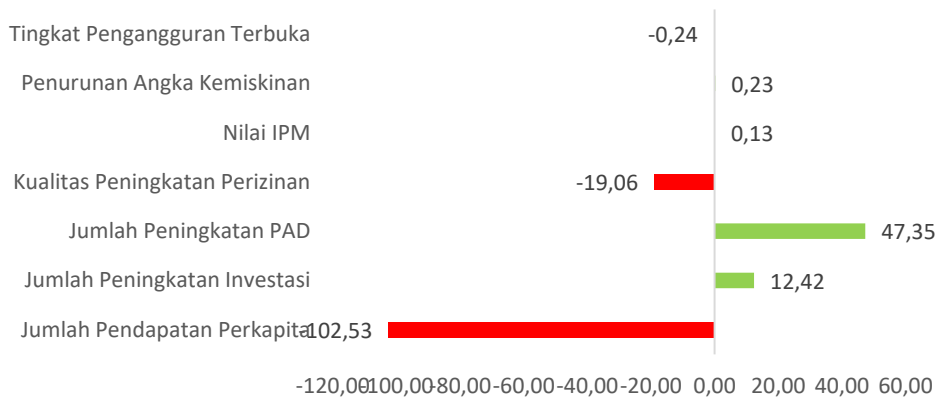
F. KABUPATEN KATINGAN



Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Katingan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Katingan memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 100%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah mencapai skor maksimal (parameter 3). Disusul oleh variabel SDM dengan skor 83% yang hampir mendekati skor maksimal. Namun terdapat skor yang sangat rendah, yaitu variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 12.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

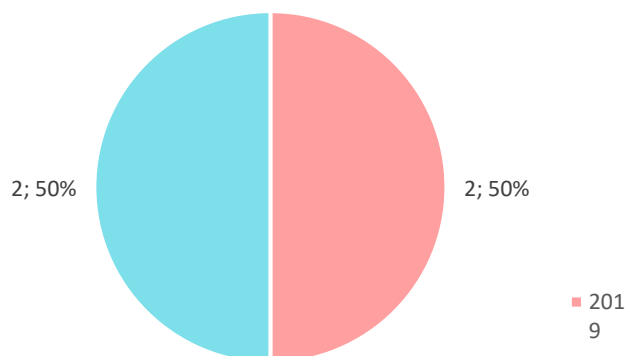


Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Katingan

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Katingan belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 47.35%. Indikator lain yang mengalami peningkatan yaitu Jumlah Peningkatan Inovasi sebesar 12.42%. Namun terdapat penurunan yang cukup signifikan pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yaitu sebesar 102.53%, angka ini sangat besar dan memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Katingan. Kemudian terjadi penurunan pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 19.06%. Untuk indikator lain tidak mengalami perubahan yang signifikan.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

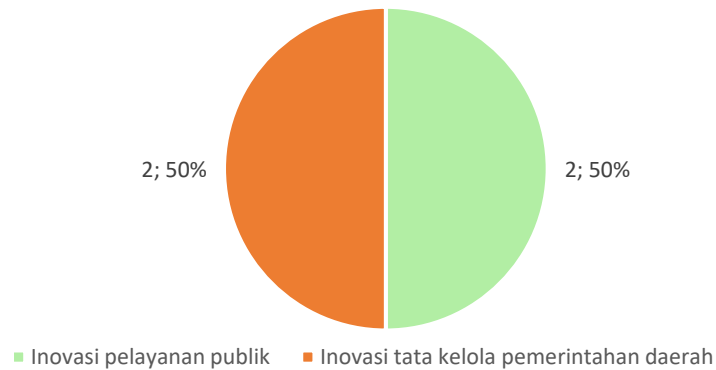
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Katingan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Katingan telah diterapkan sejak tahun 2019, sebanyak 2 inovasi. Begitu juga di tahun 2020, jumlah inovasi yang diterapkan juga sebanyak 2 inovasi.

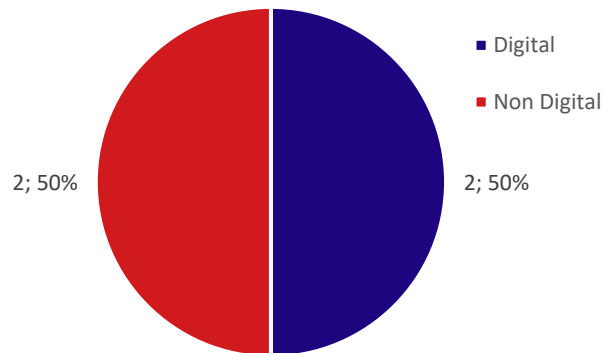
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Katingan

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 2 inovasi di Kabupaten Katingan yang merupakan inovasi pelayanan publik, dan juga terdapat 2 inovasi yang merupakan inovasi tata Kelola pemerintah daerah. Sementara bentuk inovasi lainnya belum dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

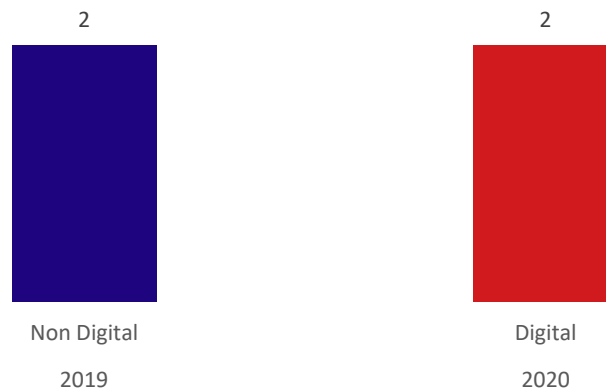
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Katingan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 2 (50.00%) dari 4 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Katingan merupakan inovasi digital, kemudian 2 (50%) inovasi atau sebagian lainnya merupakan inovasi non digital.

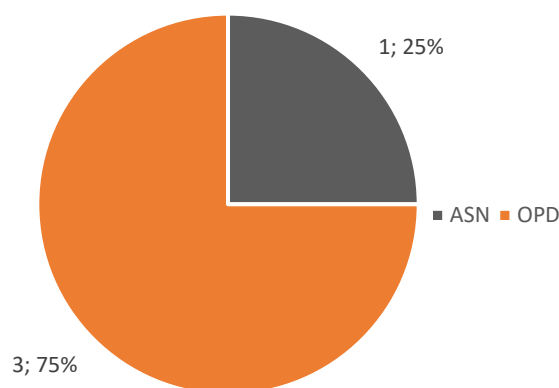
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Katingan

Secara umum jumlah inovasi di Kabupaten Katingan mengalami stagnansi dari tahun 2019 ke tahun 2020, namun jenis inovasi pada masing-masing tahun berbeda. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, sebanyak 2 inovasi merupakan inovasi non digital, sedangkan pada tahun 2020, terdapat 2 inovasi yang sudah merambah ke dunia digital.

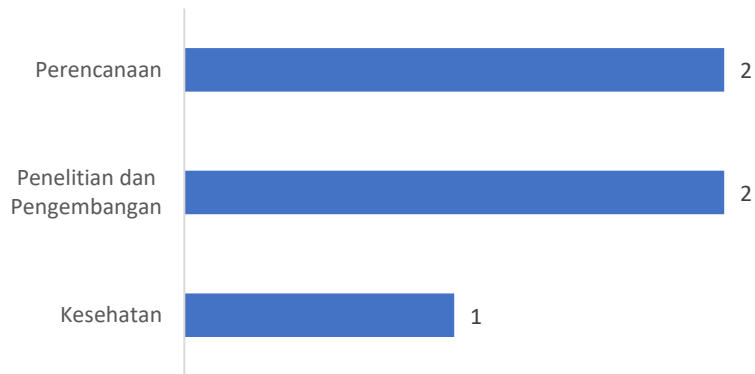
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Katingan

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Katingan pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sejumlah 3 (75%) inovasi, sementara 1 (25%) inovasi lainnya diinisiasi oleh ASN.

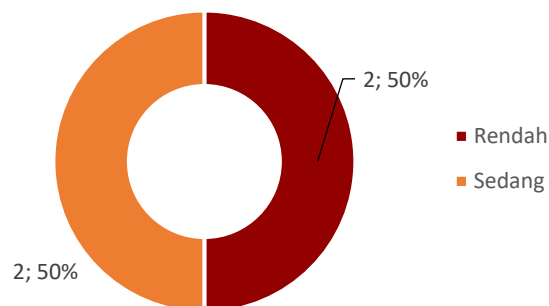
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Katingan

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Katingan berdasarkan urusan pemerintahan dapat dibidang cukup bervariasi. Dapat dilihat pada grafik bahwa dari seluruh inovasi, sebanyak 2 inovasi merupakan urusan Perencanaan, sementara 2 lainnya merupakan urusan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan 1 sisanya merupakan inovasi dalam urusan Kesehatan.

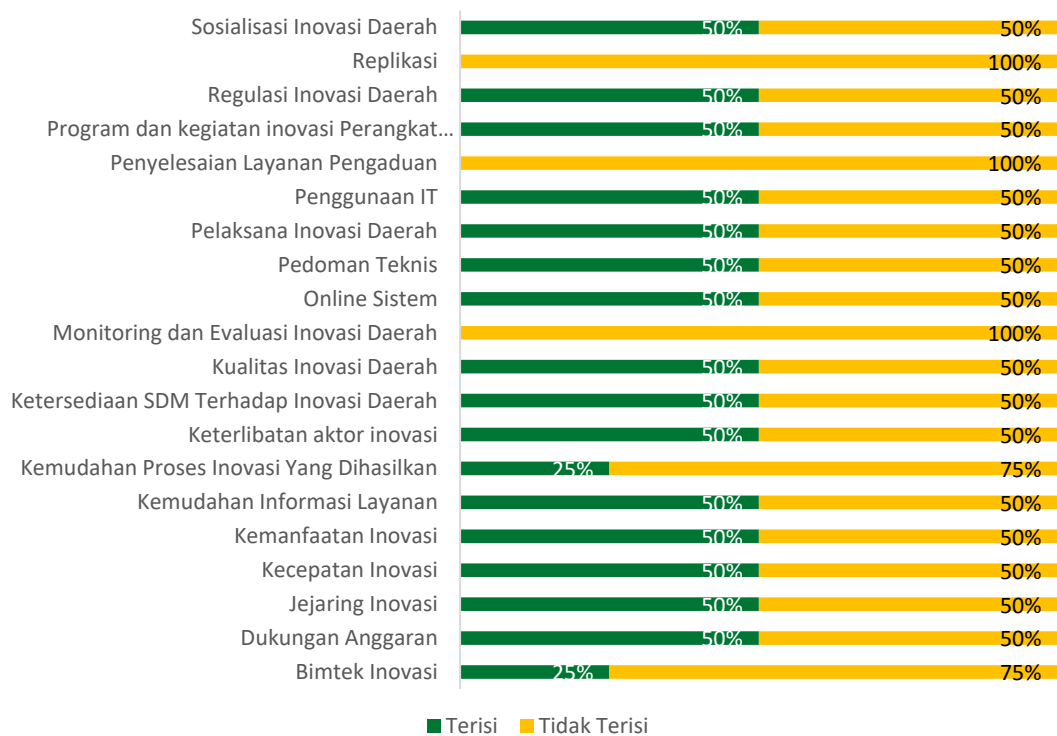
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Katingan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebanyak 2 inovasi di Kabupaten Katingan memiliki skor rendah, sementara 2 lainnya memiliki skor sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

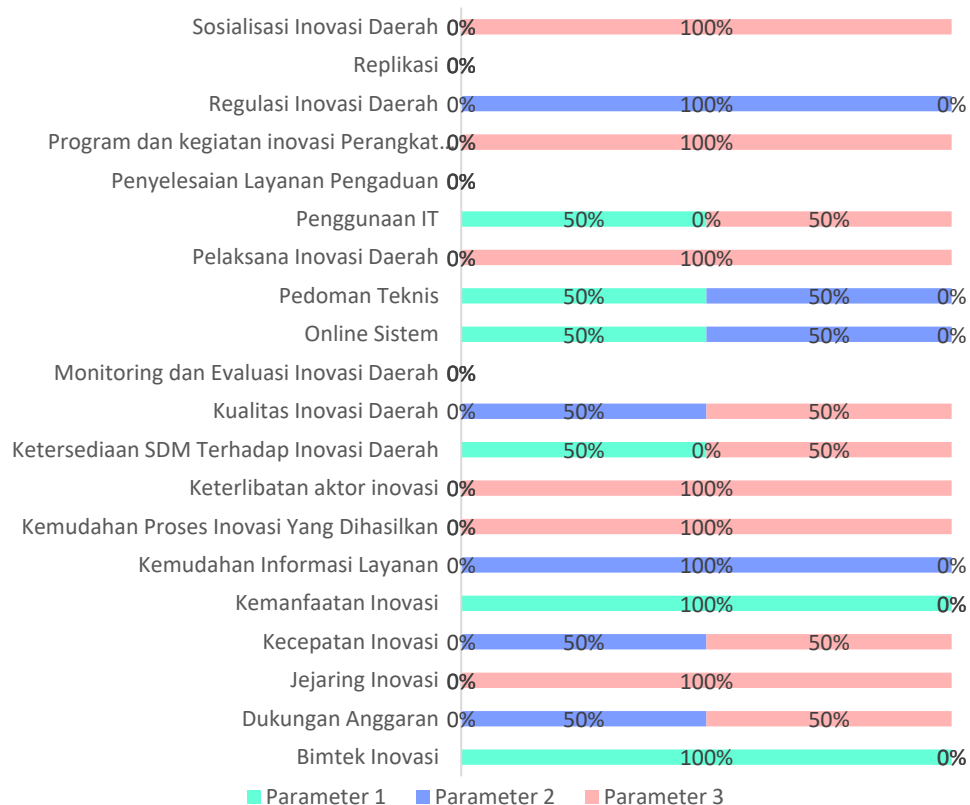
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Katingan

Dari 4 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Katingan, diperoleh data inovasi yang tidak terisi data pendukungnya pada indikator Replikasi, Penyelesaian Layanan Pengaduan, dan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah. Masing-masing indikator tersebut tidak terisi data pendukungnya dengan persentase 100%. Sedangkan untuk mayoritas indikator lain rata-rata tingkat keterisian data pendukung sebesar 50%. Sementara untuk indikator Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan dan indikator Bimtek Inovasi memiliki tingkat keterisian data pendukung sebesar 25%.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Pelaksana Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, dan Jenjang Inovasi masing-masing sebesar 100%, artinya 100% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi ada pada indikator Replikasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Kemudahan Informasi Layanan, masing-masing sebesar 100% termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Kemanfaatan Inovasi dan indikator Bimtek Inovasi, masing-masing sebesar 100%, yang artinya 100% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama.

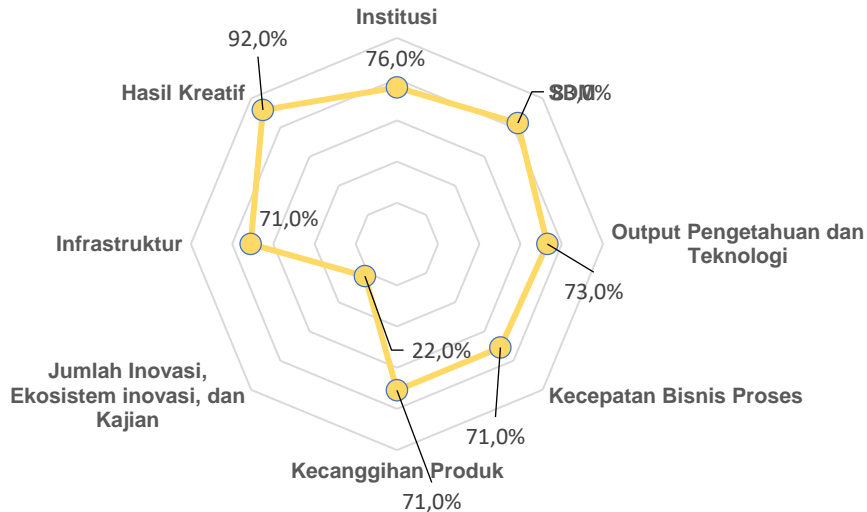
j. Daftar Inovasi Kabupaten Katingan beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Katingan beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Kompetisi Gagasan Inovasi Kabupaten Katingan	78
Bidan Jebolan Sanamang	0
SIIP BANG (Sistem Informasi Inovasi, Penelitian dan	92

Pengembangan)	
Si Luna Pede (Sistem Informasi Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah)	0

G. KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 92.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah termasruk dalam skor maksimal (parameter 3). Demikian juga indikator-indikator lain mayoritas sudah mendekati skor maksimal parameter 3. Namun, hanya skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 22.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kotawaringin Barat

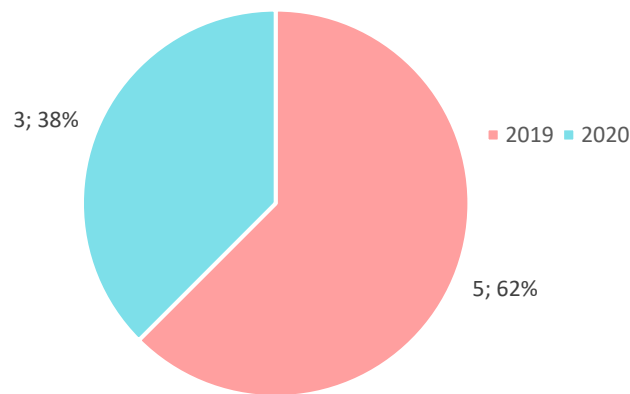
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah

Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perkembangan yang signifikan pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan, yaitu sebesar 132.36%. Selanjutnya indikator Jumlah Peningkatan PAD menunjukkan peningkatan sebesar 32%, hal ini cukup jauh melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%. Sementara indikator Penurunan Angka Kemiskinan, Nilai IPM, dan Jumlah Pendapatan Perkapita tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat menurun sebesar 2.14%, nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 0.02%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yaitu mengalami penurunan sebesar 23.87%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

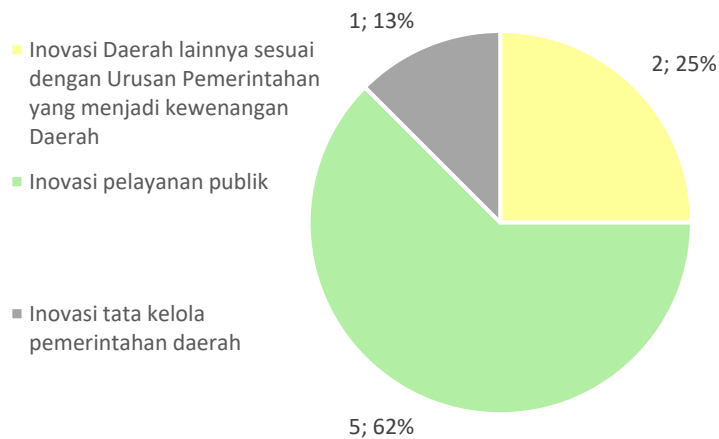
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kotawaringin Barat telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 5 (62.50%) inovasi dari 8 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 3 (37.50%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

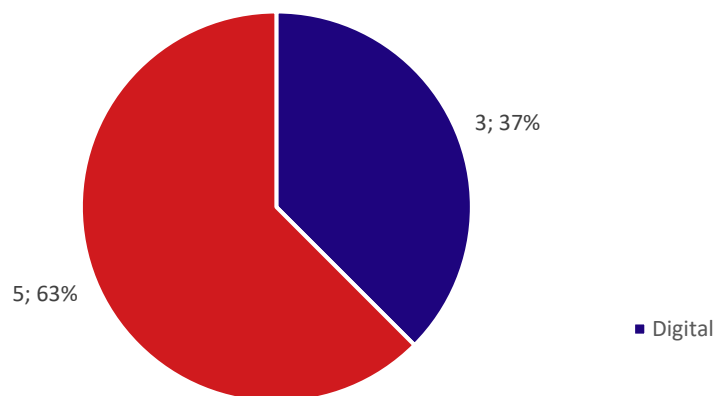
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas bentuk inovasi di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 5 (62%) inovasi. Sedangkan terdapat 2 (25%) inovasi merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan sisanya sebanyak 1 (13%) inovasi merupakan inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

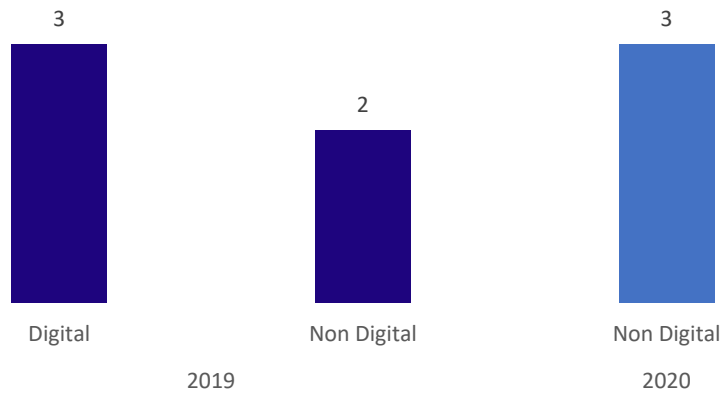
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 5 (62.50%) dari 8 inovasi daerah yang dilaporkan merupakan inovasi non digital, kemudian 3 (37.50%) inovasi merupakan inovasi digital.

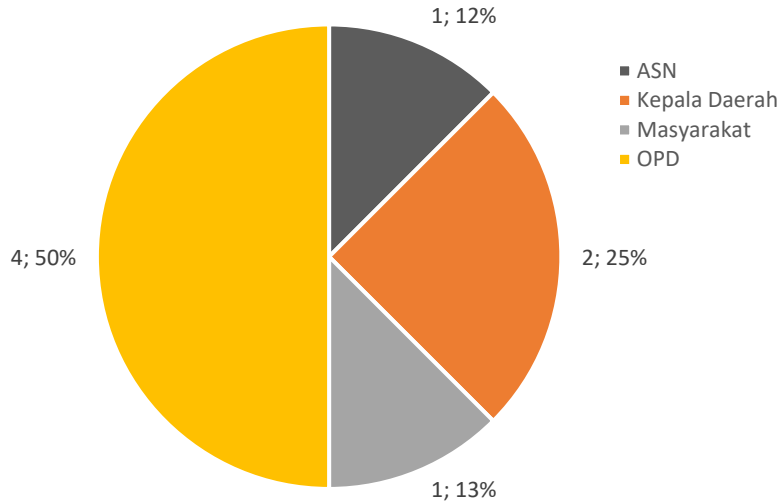
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kotawaringin Barat

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 3 inovasi namun pada tahun 2020 tidak terdapat inovasi digital yang dilaporkan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun pada inovasi non digital dapat dikatakan mengalami peningkatan meskipun hanya bertambah 1 inovasi, dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 3 inovasi.

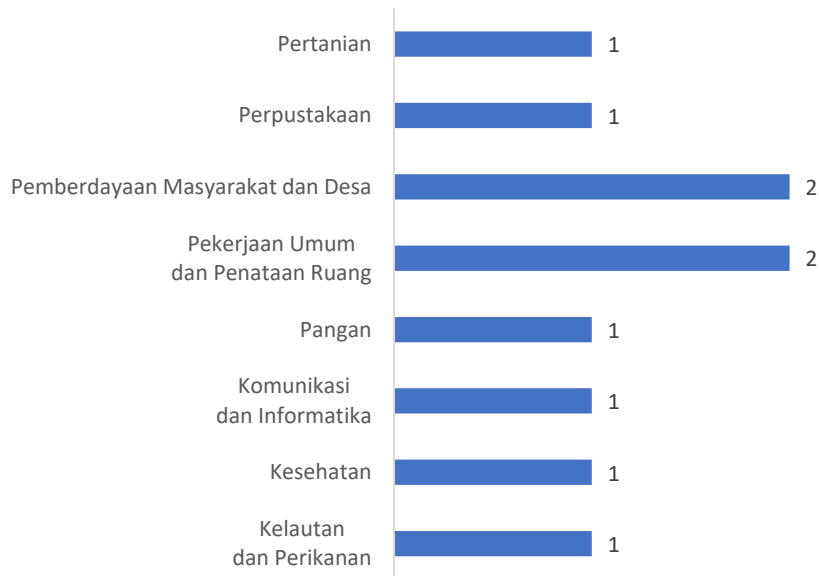
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan InisiatorInovasi pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sejumlah 4 (50%) inovasi, sementara 2 (25%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN dan Masyarakat masing-masing berjumlah 1 (12.50%) inovasi.

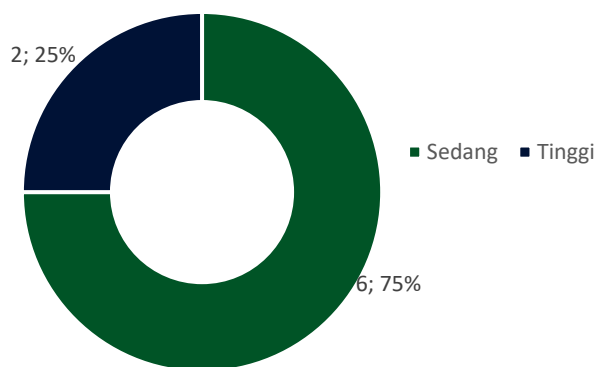
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan urusan pemerintahan dapat dikatakan cukup merata. Urusan yang agak menonjol adalah inovasi pada urusan kesehatan dan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang masing-masing berjumlah 2 inovasi. Sementara inovasi urusan lainnya, yaitu Pertanian, Perpustakaan, Pangan, Komunikasi dan Informatika, Kesehatan, dan Kelautan dan Perikanan masing-masing berjumlah 1 inovasi.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

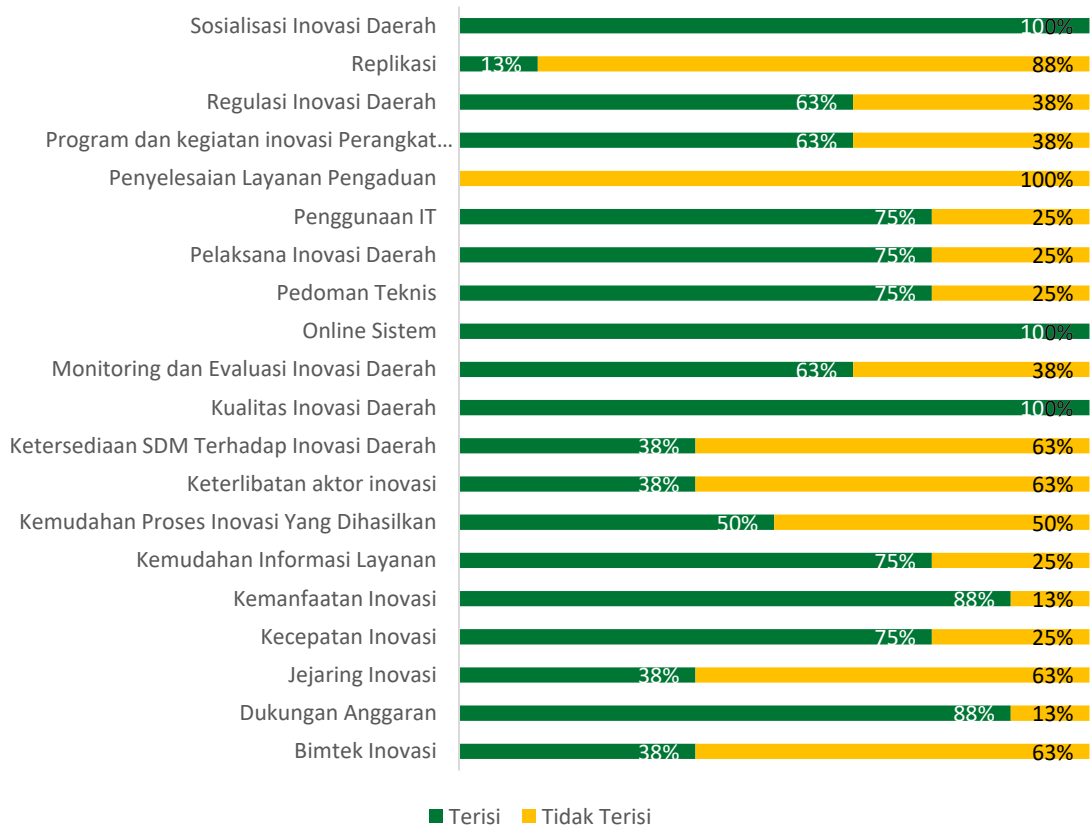


Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kotawaringin Barat sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu sejumlah 6 (75%) inovasi. Selain itu, terdapat 2 (25%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai

skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

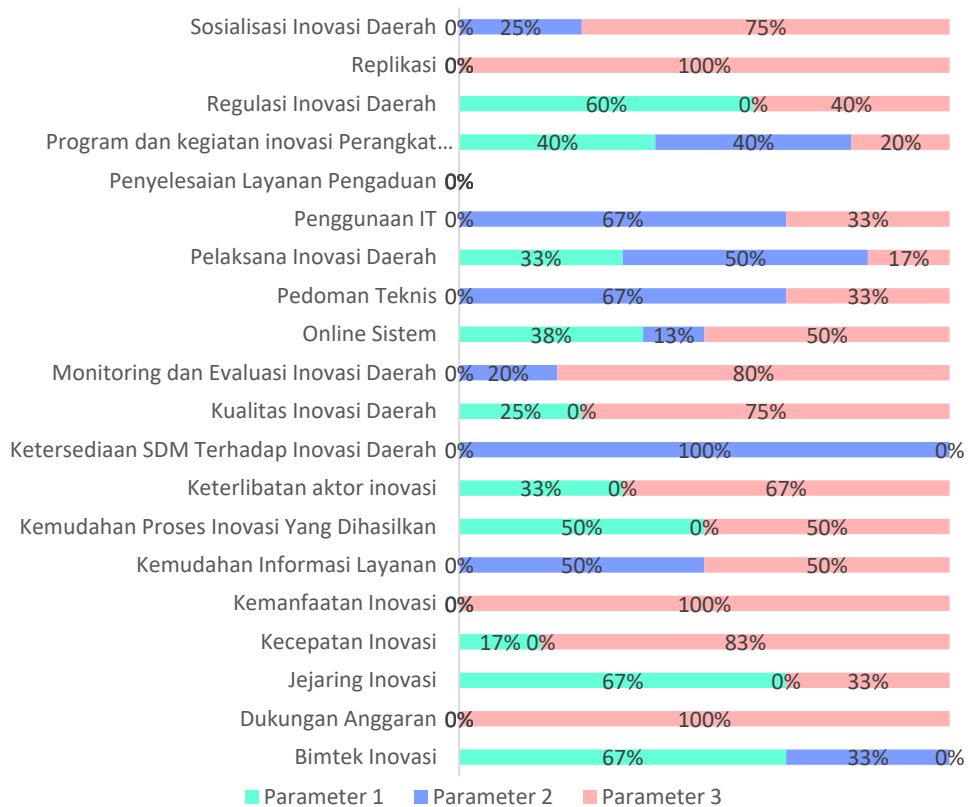
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Dari 8 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kotawaringin Barat, diperoleh rata-rata inovasi sudah terisi data pendukungnya di mayoritas indikator, terutama pada indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Online Sistem, Kualitas Inovasi Daerah memiliki tingkat keterisian indikator 100%, disusul oleh indikator Kemanfaatan Inovasi dan Dukungan Anggaran, yang masing-masing memiliki tingkat keterisian sebesar 88%. Sementara sebanyak 5 indikator memiliki tingkat keterisian 75%, 3 indikator dengan tingkat keterisian 63%, 1 indikator dengan tingkat keterisian 50%, 4 indikator dengan tingkat keterisian 38%, dan 1 lagi indikator dengan tingkat keterisian 13%. Meskipun demikian, terdapat 1 indikator yang memiliki tingkat keterisian 0%, yaitu Penyelesaian Layanan Pengaduan.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Replikasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Dukungan Anggaran masing-masing sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah sebesar 100%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi, sebesar 67% artinya 67% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Bimtek Inovasi, dst.

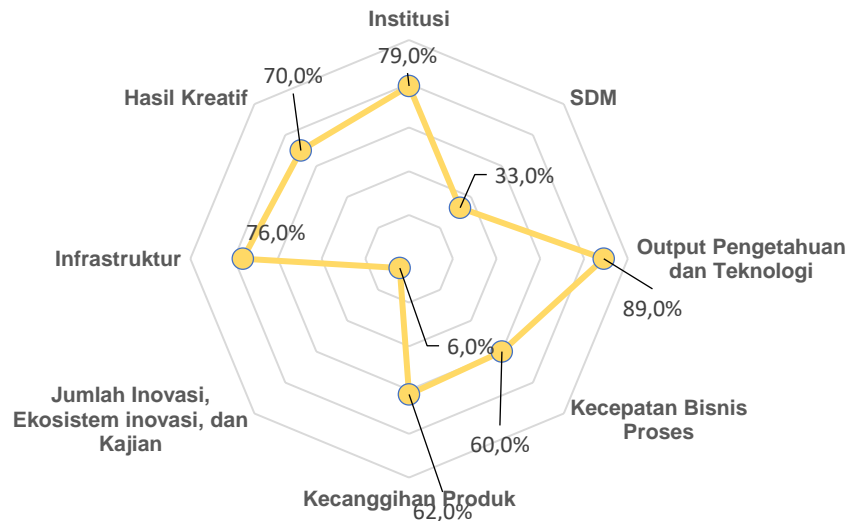
j. Daftar Inovasi Kabupaten Kotawaringin Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Kotawaringin Barat beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
PELUKAN menuju SNI (Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan menuju SNI)	84
Layanan e-pusdakobar	74
JariToga	101
PIROLISATOR ALAT LIQUID SMOKE	96
Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Jalan di Tengah Pandemi	74

Covid - 19	
PELAYANAN USAHA PETERNAKAN KOLEKTIF BERJAMAAH (SALEKAH)	104
CSR Partisipatif Infrastruktur Jalan Tahun 2019 - 2020 (Infrastruktur untuk Negeri)	69
JEMPOL (Jendela Advokasi Maps Online) 2021	71

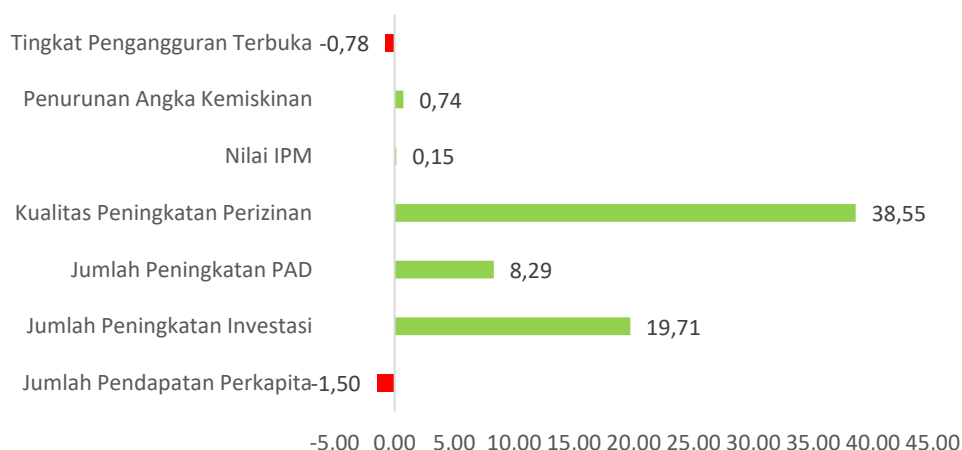
H. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 89.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Begitu juga dengan variabel Institusi (79.9%), Infrastruktur (70%), dan Hasil Kreatif (70%) terbilang memiliki skor yang mendekati parameter 3. Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian (6%) dan SDM (33%) masih sangat rendah dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 38.55%, dimana nilai tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya, indikator Jumlah Peningkatan Investasi juga mengalami peningkatan sebesar 19.71% yang mana juga menunjukkan peningkatan cukup bagus, demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan PAD yang meningkat sebesar 8.29%. Namun Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami penurunan pada Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.78% dan juga pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita menurun sebesar 1.50%, namun nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

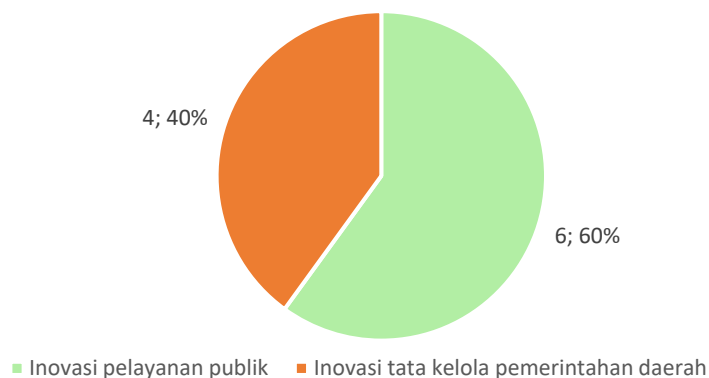
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 5 (50%) inovasi dari 10 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan sisanya sebanyak 5 (50%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

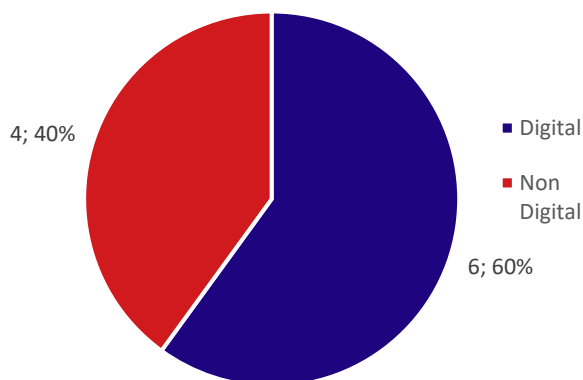
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat 4 (40%) inovasi pelayanan publik dan 6 (60%) inovasi tata Kelola pemerintahan daerah.

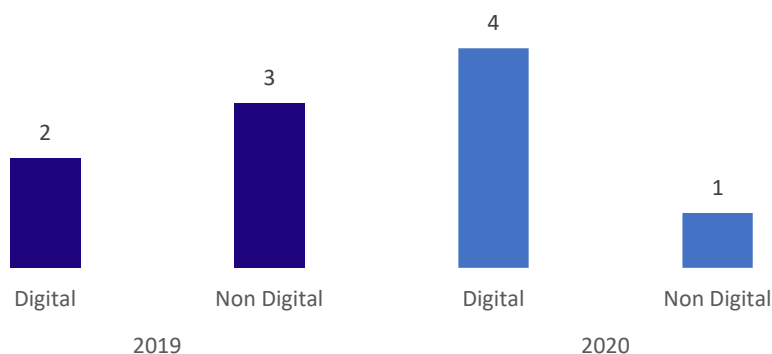
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, terdapat 2 jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu sebanyak 4 (40.00%) dari 10 inovasi daerah merupakan inovasi non digital, kemudian 6 (60.00%) inovasi merupakan inovasi digital.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kotawaringin Timur

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 1 inovasi. Namun lain halnya dengan inovasi non digital mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 3 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 4 inovasi. Peningkatan inovasi pada jenis digital dapat dikatakan merupakan hal yang baik di era modern seperti sekarang.

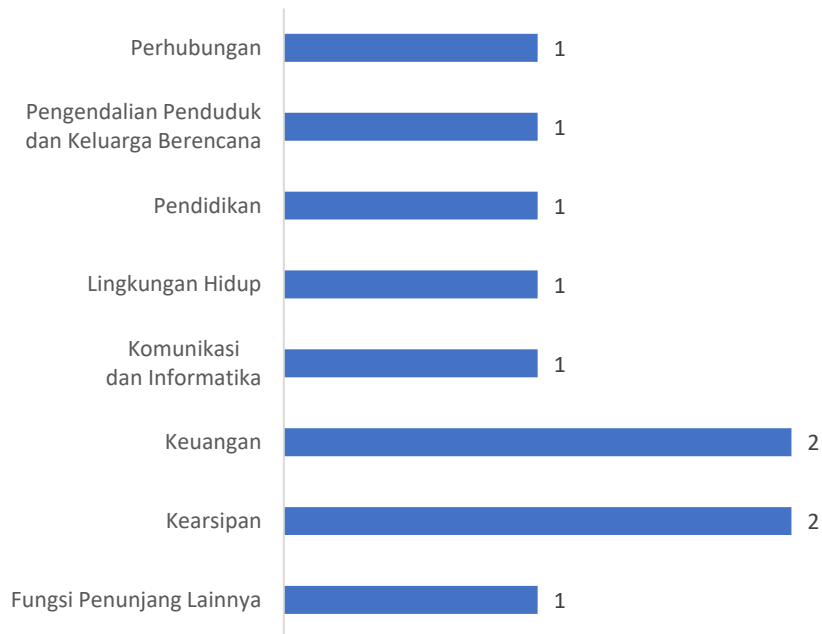
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2021 diinisiasi sebagian oleh ASN, yaitu sejumlah 5 (50.00%) inovasi dan 5 (50.00%) lainnya diinisiasi oleh OPD. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

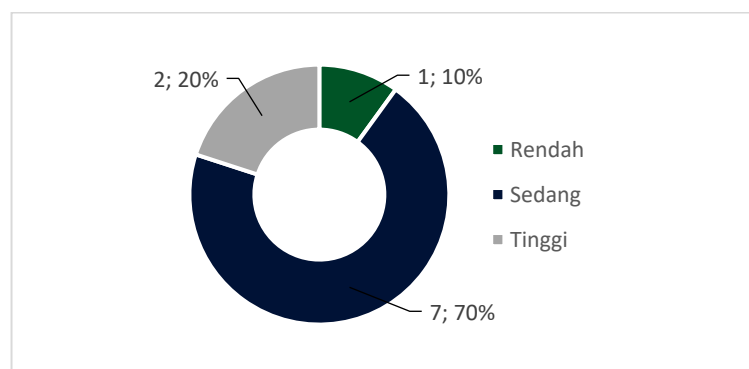
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata, kecuali pada urusan Kearsipan dan Keuangan yang lebih menonjol dari urusan lainnya. Urusan Kearsipan dan Kesehatan masing-masing berjumlah 2 inovasi dari 10 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat seluruh urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan Perhubungan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika, dan urusan penunjang lainnya masing-masing sebanyak 1 inovasi.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

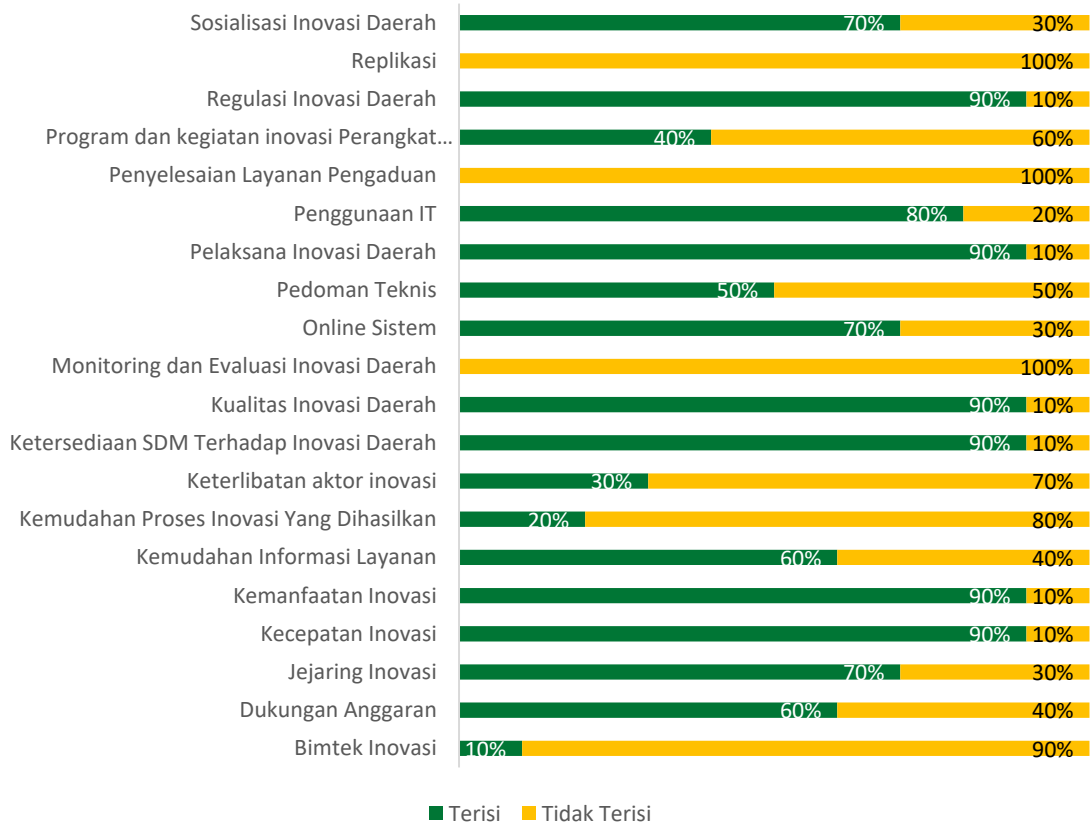


Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu sejumlah 7 (70%) inovasi. Selain itu, terdapat 2 (20%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi dan 1 (10%) inovasi yang memiliki skor rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor

kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

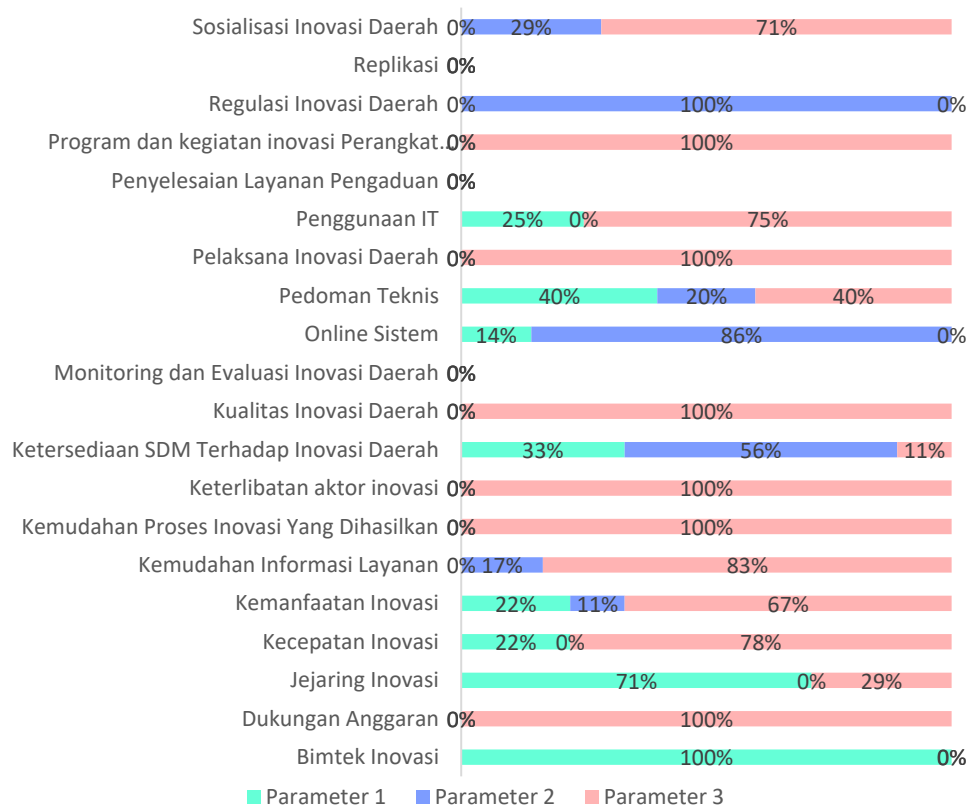
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Dari 10 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 45% sedangkan 55% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Replikasi, Penyelesaian Layanan Pengaduan, dan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat ketidakterisian data pendukung sebesar 100%. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling tinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, Pelaksana Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi, dan Kecepatan Inovasi, yang masing-masing sebesar 90%.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Lunak Daerah dalam RKPD, Pelaksana Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, dan indikator Dukungan Anggaran masing-masing sebesar 100%, artinya seluruh dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 100% dan indikator Online Sistem sebesar 86%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter 2. Sementara indikator yang termasuk dalam parameter 1 dengan persentase terbesar adalah indikator Bimtek Inovasi (100%).

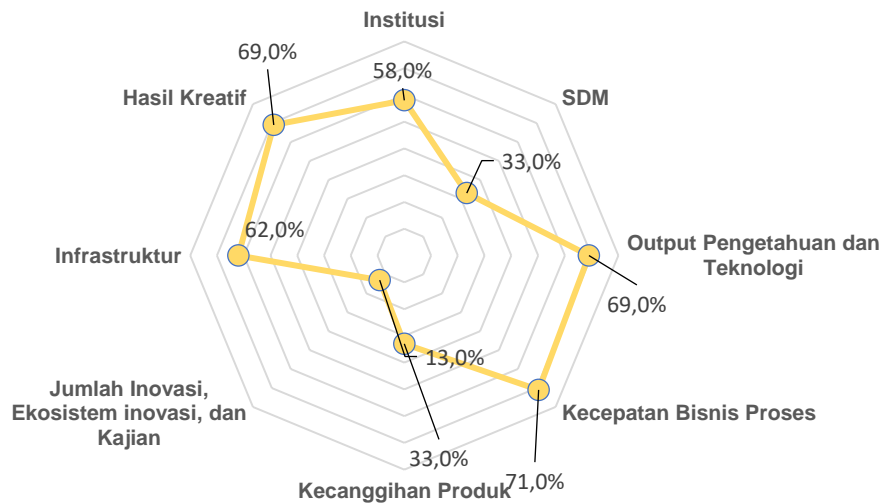
j. Daftar Inovasi Kabupaten Kotawaringin Timur beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Kotawaringin Timur beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
E-Beschikking	73
Pengelolaan Arsip Secara Elektronik Cepat, Informatif, Tertib, Aman (PARSEL CINTA)	61
INTEGRASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA APLIKASI	0

PEMERINTAH	
e-BPHTB	98
E-SPPT	102
PRO KB PEKA PUAN (PROGRAM KELUARGA BERENCANA PEDULI PEKERJA PEREMPUAN DI PERKEBUNAN)	101
Rungghah Ortal (Rumah Singgah Untuk Orang Terlantar)	71
Data Dalam Genggaman (DDG)	87
Pelayanan Pengelolaan Sampah	87
BUSA PAUD (BUKU SAKU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)	80

I. KABUPATEN LAMANDAU



Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lamandau

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Lamandau memiliki skor tertinggi pada variabel Kecepatan Bisnis Proses, yaitu 71.0%, disusul oleh variabel Output Pengetahuan & Teknologi dan Hasil Kreatif masing-masing 69.0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel-variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih sangat rendah, yaitu 13.0%, kemudian variabel SDM dan Kecanggihan Produk sebesar 33.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel-variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

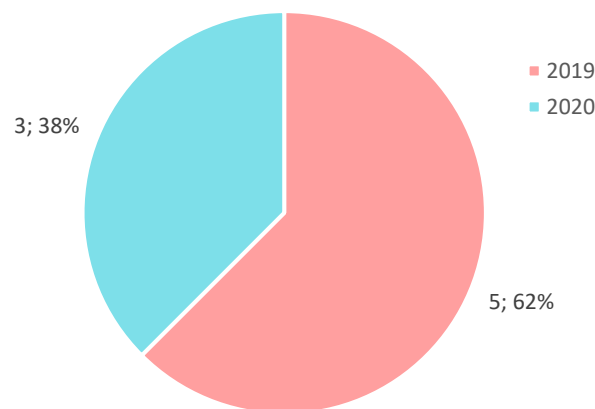


Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lamandau

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lamandau cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan signifikan pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 42.07%, kemudian indikator Jumlah Peningkatan PAD menurun sebesar 20.86%, dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%. Selanjutnya, indikator Jumlah Peningkatan Investasi juga mengalami penurunan sebesar 4.52%. Namun terdapat peningkatan pada Jumlah Pendapatan Perkapita di Kabupaten Lamandau sebesar 2.51%, meskipun tidak signifikan.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

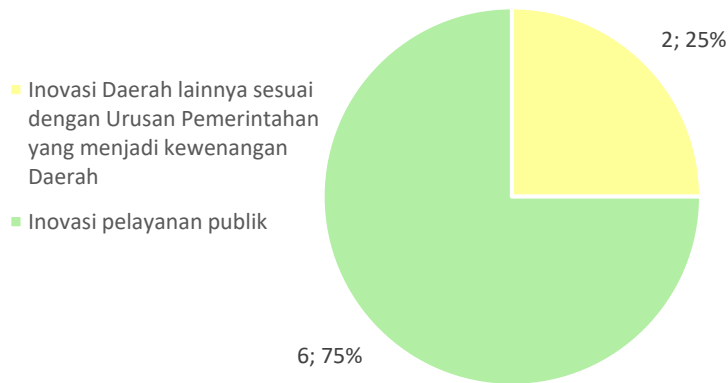
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Lamandau

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lamandau telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 3 (37.50%) inovasi dari 8 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 5 (62,50%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

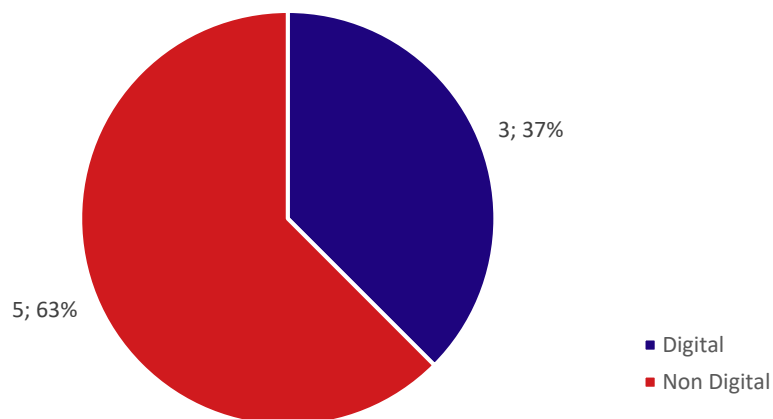
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Lamandau

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lamandau, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya. Terdapat 2 (25%) inovasi pelayanan publik dan 6 (75%) inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

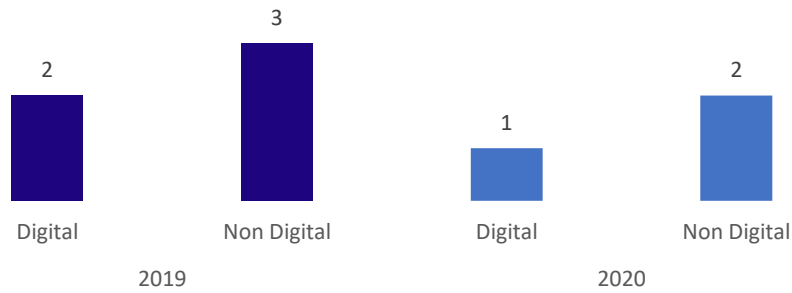
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Lamandau

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 5 (62.50%) dari 8 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Lamandau merupakan inovasi non digital, kemudian sisanya 3 (37.50%) inovasi merupakan inovasi digital. Artinya mayoritas inovasi di Kabupaten Lamandau merupakan inovasi digital.

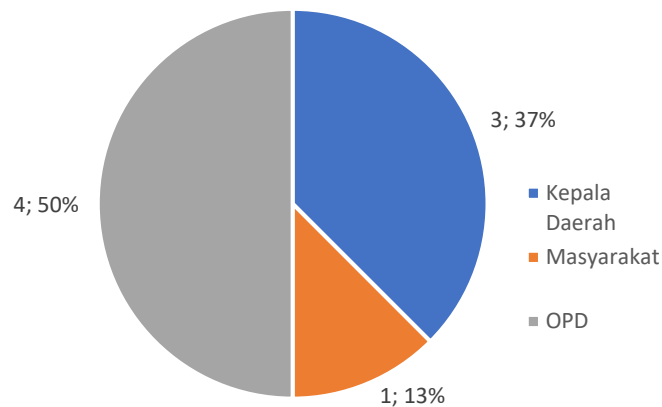
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Lamandau

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 1 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 3 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 2 inovasi.

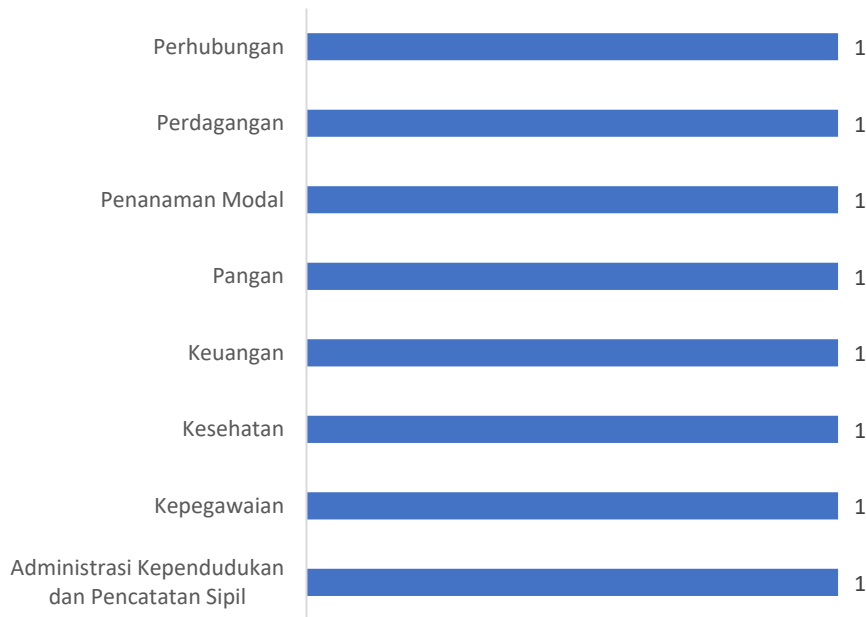
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Lamandau

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Lamandau pada tahun 2021 diinisiasi oleh kepala daerah, yaitu sejumlah 3 (37.50%) inovasi, kemudian 4 (50.00%) inovasi diinisiasi oleh OPD, dan sisanya 1 (12.50%) inovasi diinisiasi oleh masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

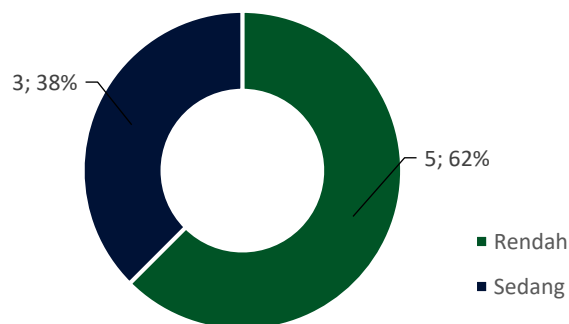
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Lamandau

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Lamandau berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata, yaitu masing-masing urusan berjumlah 1 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat seluruh urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan perhubungan, perdagangan, penanaman modal, pangan, keuangan, kesehatan, kepegawaian, dan administrasi kependudukan & pencatatan sipil.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Lamandau

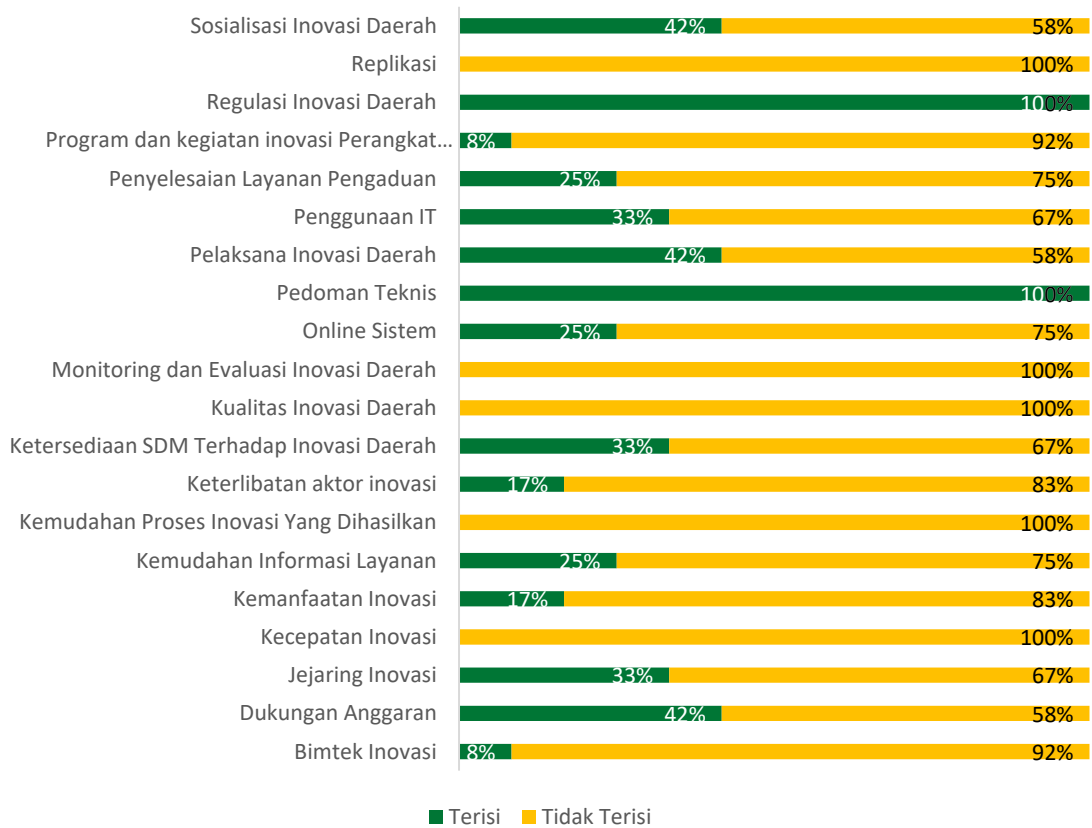


Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Lamandau

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu sejumlah 5 (62%) inovasi. Selain itu, terdapat 3 (38%) inovasi sudah mencapai skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor

kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

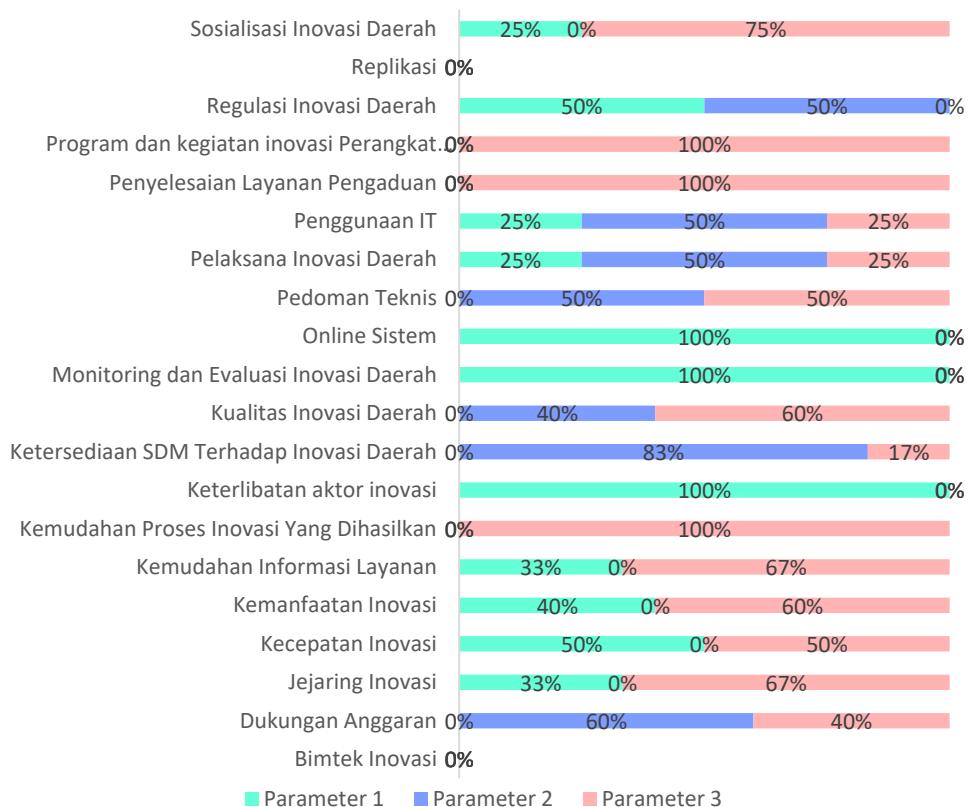
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lamandau

Dari 8 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lamandau, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 36,88% sedangkan 63,13% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu masing-masing sebesar 75% artinya 6 dari 8 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lamandau telah terisi data pendukung pada kedua indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah atau memiliki tingkat ketidak terisian tertinggi adalah indikator Replikasi dan Bimtek Inovasi yaitu masing-masing sebesar 100%.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan, dan indikator Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, masing-masing sebesar 100%, artinya seluruh dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, sebesar 83%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Daerah, dan Keterlibatan Aktor Inovasi masing-masing sebesar 100%.

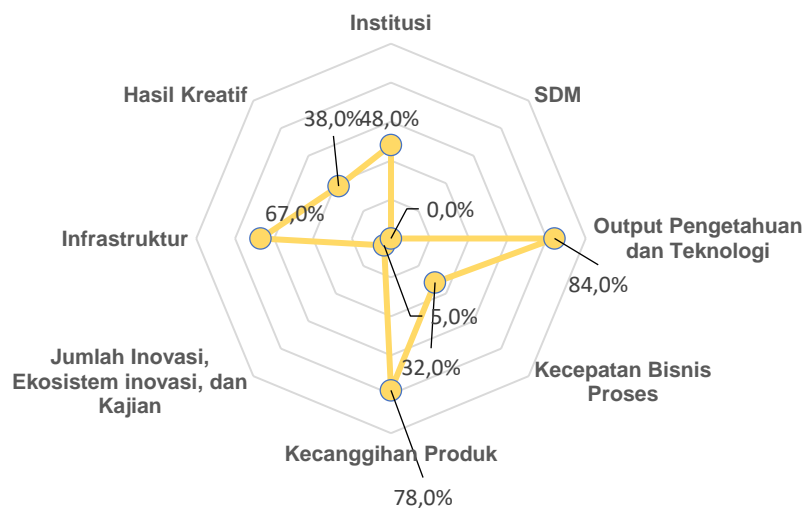
j. Daftar Inovasi Kabupaten Lamandau beserta Skor Kematangannya

Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Lamandau beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
PKK Kabupaten Lamandau Berbagai	24
Pusat Pelayanan Publik Terintegrasi	17
Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Jemput Bola (Jebol)	31
Lamandau Store	26
BluE / Bukti Lulus Uji Elektronik	81

Pusat Pelayanan Publik Terintegritas (P3T) Dan Launching BRIVA PBB-P2 Tahun 2019 Di Kabupaten Lamanadau.	44
OPAL (OBOR PANGAN LESTARI)	64
SI ANTAR	67

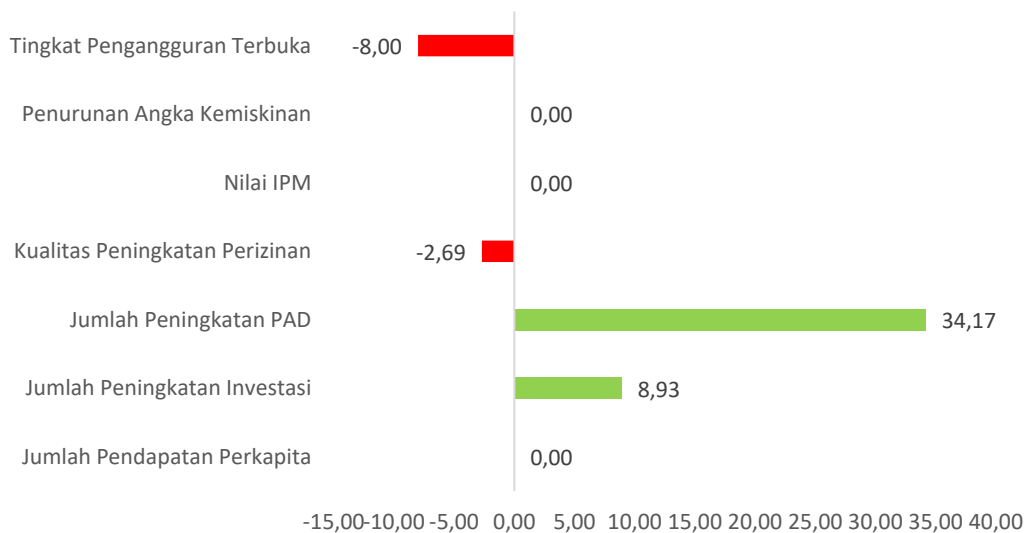
J. KABUPATEN MURUNG RAYA



Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Murung Raya memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 84.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Begitu juga dengan variabel Kecanggihan Produk, dan Infrastruktur yang termasuk ke dalam skor parameter 3. Sedangkan variabel Institusi dan Hasil Kreatif termasuk ke dalam parameter 2. Lalu untuk variabel Kecepatan Bisnis Proses; Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1, dan yang paling rendah adalah variabel SDM yaitu 0%.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

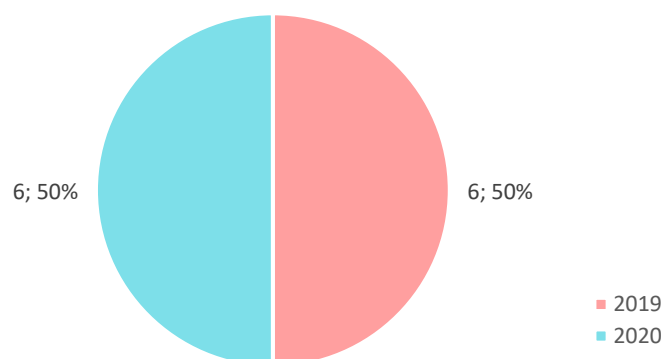


Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Murung Raya

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Murung Raya belum mengalami perkembangan yang signifikan secara keseluruhan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 34.17%, dimana nilai tersebut merupakan peningkatan yang paling signifikan diantara indikator lain. Selanjutnya, indikator Jumlah Peningkatan Inovasi juga mengalami peningkatan sebesar 8.93% meskipun tidak signifikan. Di sisi lain indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menurun sebesar 8% dan indikator Kualitas Peningkatan Perizinan menurun sebesar 2.69%. Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga mengalami stagnansi pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, Nilai IPM, dan Jumlah Pendapatan Perkapita.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

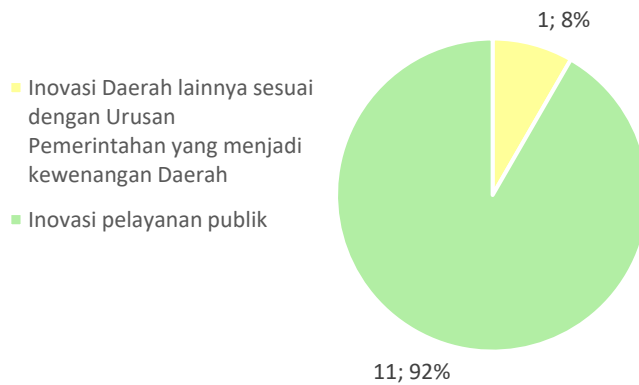


Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Murung Raya

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Murung Raya telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 6 (50%) inovasi dari 12 inovasi yang dilaporkan

tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 6 (50%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

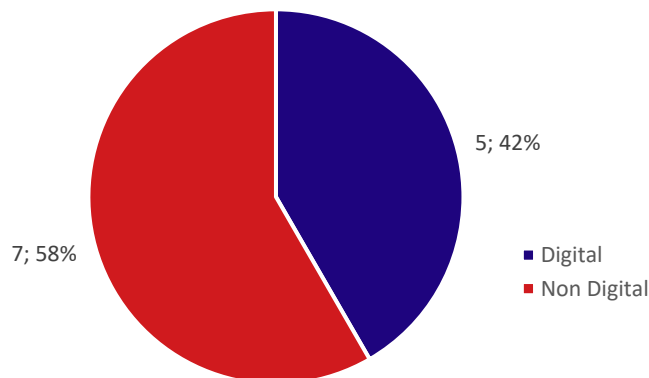
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi inovasi pelayanan publik mendominasi sedangkan inovasi daerah lainnya hanya berjumlah 1 (8%). Terdapat 11 (92%) dari 12 inovasi yang merupakan inovasi pelayanan publik.

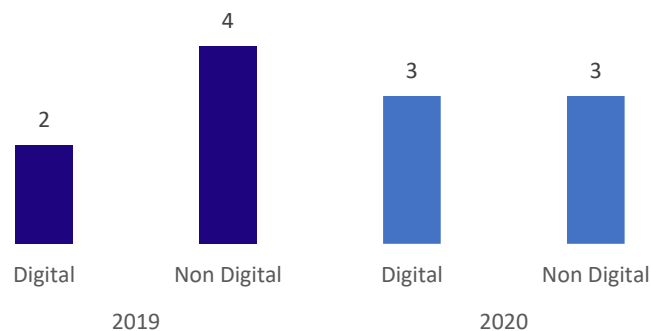
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Murung Raya

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 5 (41.67%) dari 12 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Murung Raya merupakan inovasi digital, kemudian 7 (58.33%) inovasi merupakan inovasi non digital.

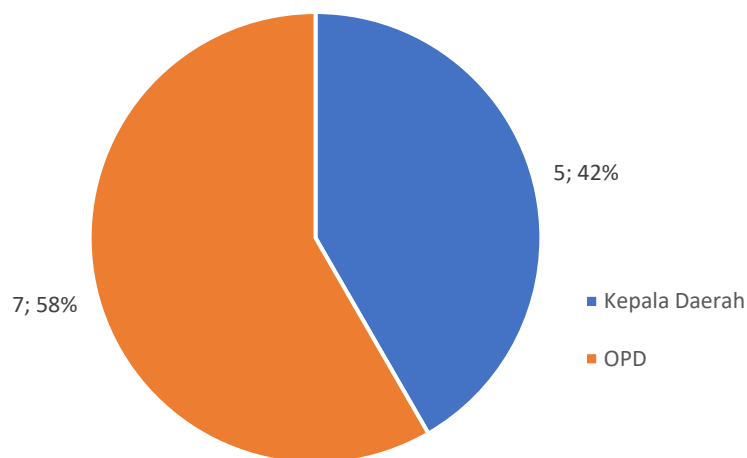
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Murung Raya

Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 3 inovasi, meskipun peningkatan tersebut tidak dapat dikatakan signifikan. Sedangkan dengan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 4 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 3 inovasi.

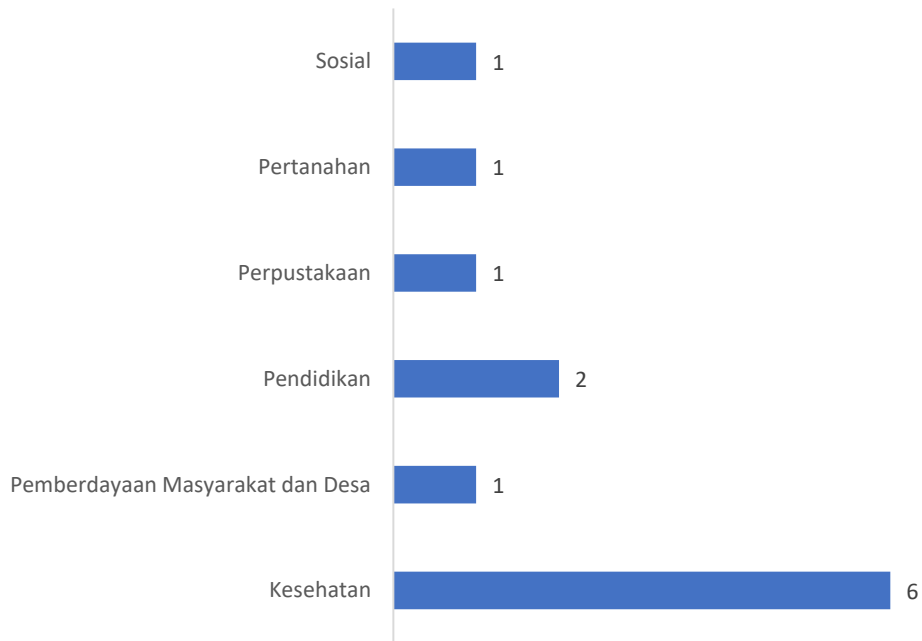
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Murung Raya

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Murung Raya pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sejumlah 7 (58.33%) inovasi sementara 5 (41.67%) lainnya diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

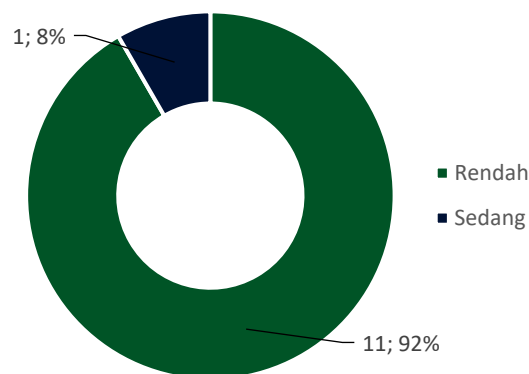
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Murung Raya

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Murung Raya berdasarkan urusan pemerintahan tidak merata, urusan kesehatan menjadi yang paling banyak diantara yang lainnya. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 6 inovasi dari 12 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat seluruh urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial, pertanahan, perpustakaan, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang masing-masing jumlahnya 1 inovasi. Sedangkan untuk urusan Pendidikan berjumlah 2 inovasi.

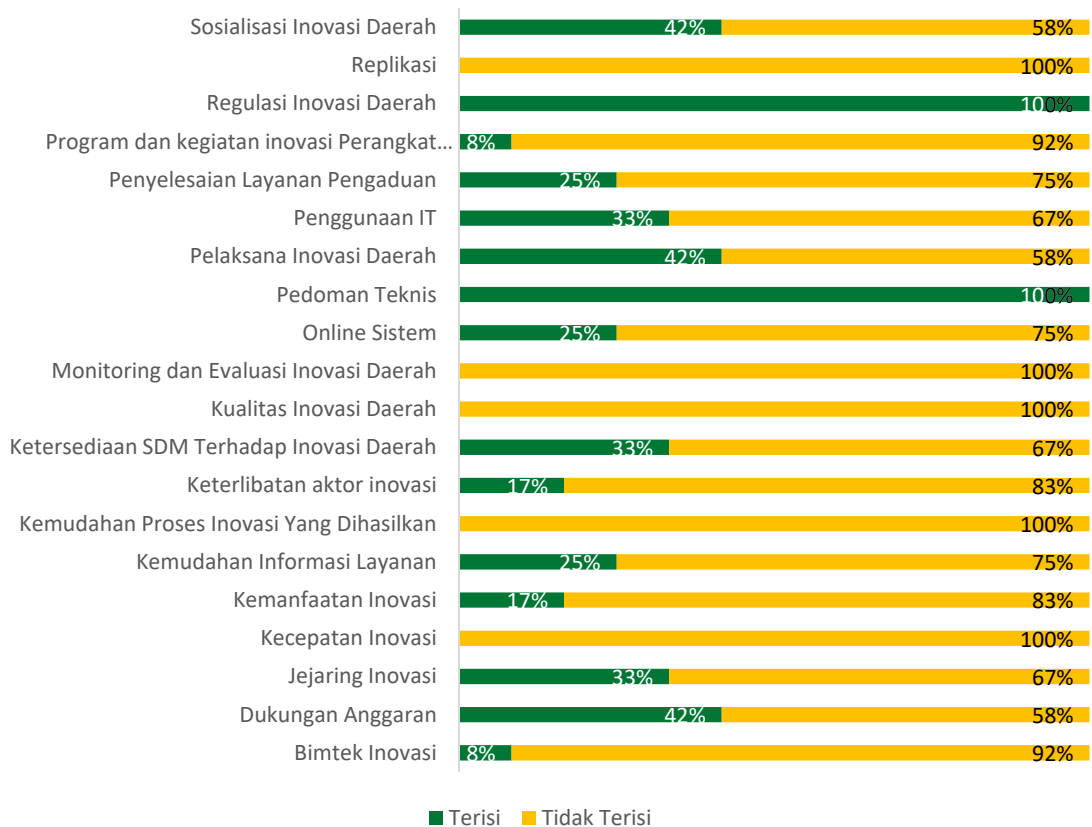
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Murung Raya

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi di Kabupaten Murung Raya masih berada pada skor kematangan rendah, yaitu sejumlah 11 (92%) inovasi. Selain itu, 1 (8%) inovasi sisanya memiliki skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

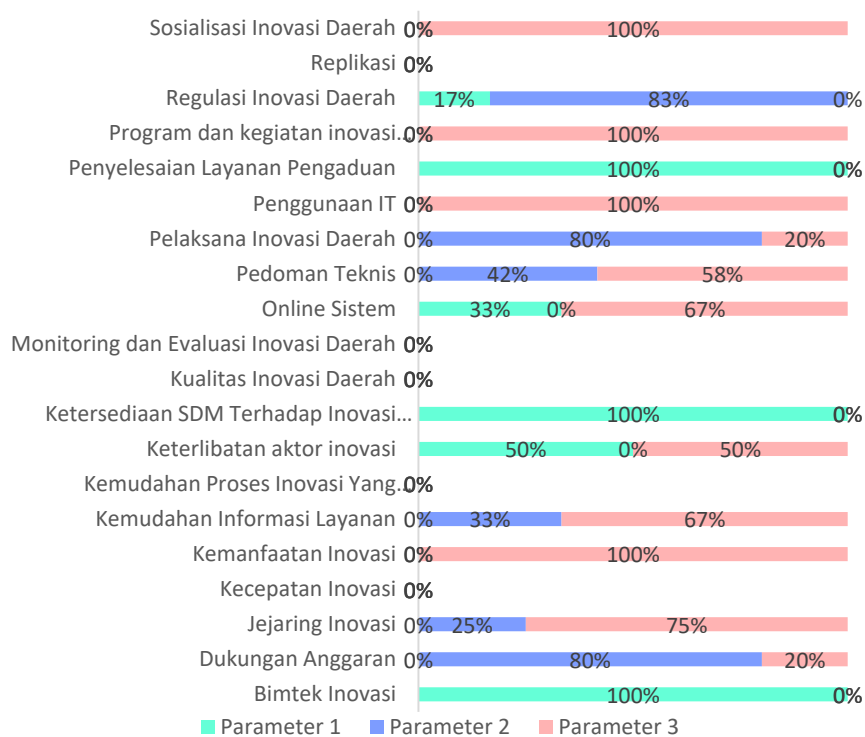
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya

Dari 12 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Murung Raya, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 72.50% sedangkan 27.50% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Pedoman Teknis merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu masing-masing sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Murung Raya telah terisi data pendukung pada kedua indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah, atau memiliki tingkat ketidak terisian paling tinggi adalah indikator Replikasi, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, dan Kecepatan Inovasi yaitu masing-masing sebesar 100% artinya hanya dari seluruh inovasi yang dilaporkan, data pendukung untuk indikator-indikator tersebut tidak terisi. Secara keseluruhan tingkat keterisian data pendukung pada inovasi di Kabupaten Murung Raya masih rendah.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penggunaan IT, Kemanfaatan Inovasi masing-masing sebesar 100%, artinya 100% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, (83%), Pelaksana Inovasi Daerah (80%), dan Dukungan Anggaran (80%). Lalu untuk indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi ada pada indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, dan Bimtek Inovasi masing-masing sebesar 100%.

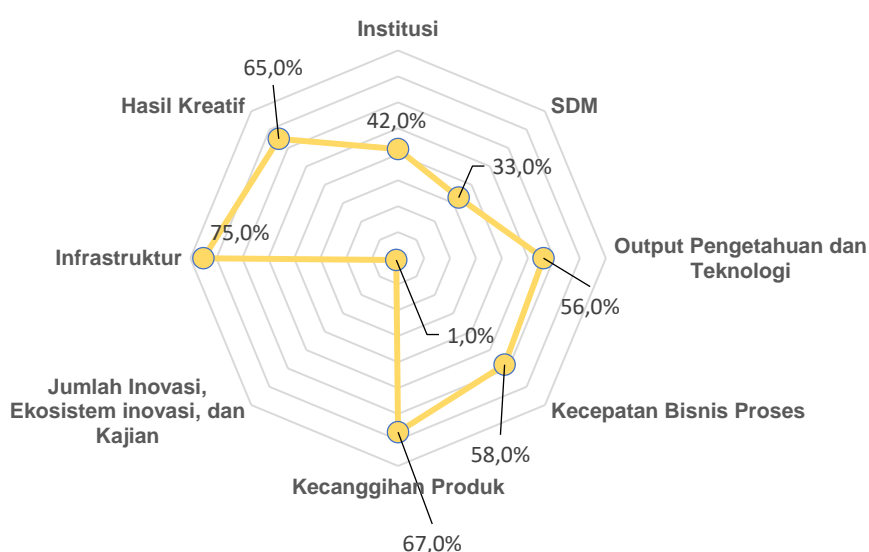
j. Daftar Inovasi Kabupaten Murung Raya beserta Skor Kematangannya

Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Murung Raya beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Program Kartu Murung Raya Cerdas	26
Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya	17
Geriatric Sehat Mandiri (GSM) RSUD Puruk Cahu	34
Program Akta Kelahiran Terintegrasi (PAKTE) RSUD Puruk Cahu	42
Amang RSUD Puruk Cahu (Pendaftaran Online)	54
Penyediaan Ruang Ibu Menyusui	8
Kartu Elektronik Rekam Medik (E-RM)	40

Kartu Murung Raya Sejahtera	43
Pengembangan dan Penyerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa	12
Pengembangan Sistem BPHTB Online dan Integrasi Data Pertanahan Dengan Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dan Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Murung Raya	8
Transformasi Perpustakaan Murung Raya Seru (Transper Mura Seru)	35
Public Safety Center (PSC) 119	12

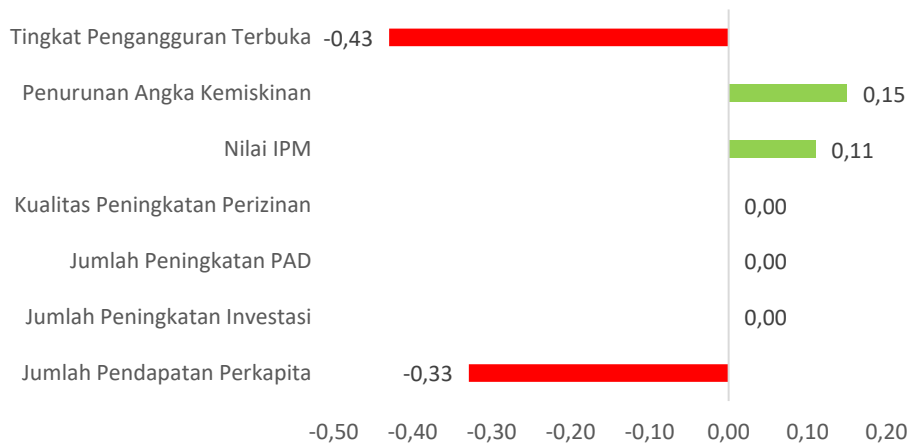
K. KABUPATEN PULANG PISAU



Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pulang Pisau

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Pulang Pisau memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur, yaitu 75.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Selain variabel Infrastruktur, variabel lain yang termasuk pada skor parameter 3 yaitu variabel Kecanggihan Produk (67%). Sedangkan yang termasuk pada skor parameter 2 adalah variabel: Hasil Kreatif (65%), Kecepatan Bisnis Proses (58%), Output Pengetahuan dan Teknologi (50%), dan Institusi (42%). Variabel yang memiliki skor terendah adalah Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian, yaitu sebesar 1% saja.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

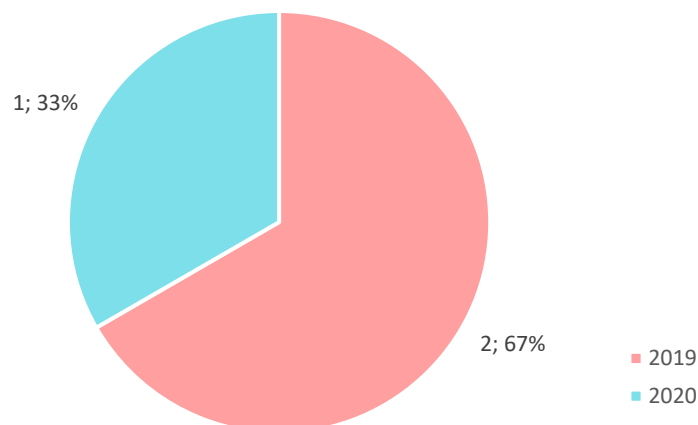


Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pulang Pisau

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan sebesar 0.15%, dimana kenaikan tersebut menunjukkan adanya perubahan menuju arah yang lebih baik. Selanjutnya, indikator IPM juga mengalami kenaikan sebesar 0.11%. Sementara itu, terdapat indikator yang mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (menurun 0,43%), namun penurunan tersebut menunjukkan sebuah kemajuan, artinya pengangguran semakin berkurang. Lalu indikator Jumlah Pendapatan Perkapita menurun sebesar 0,33%, namun nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

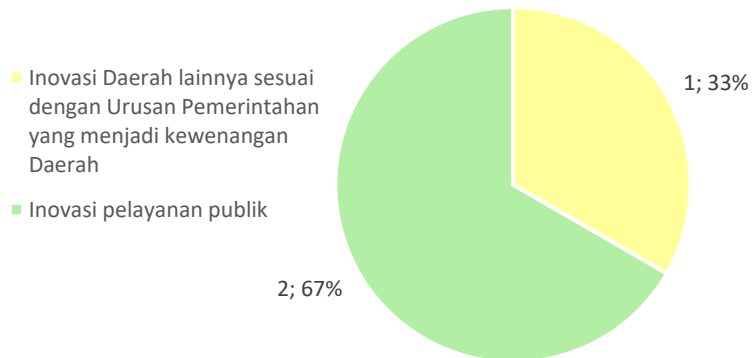
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Pulang Pisau

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pulang Pisau telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 2 (66.67%) inovasi dari 3 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 1 (33,33%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

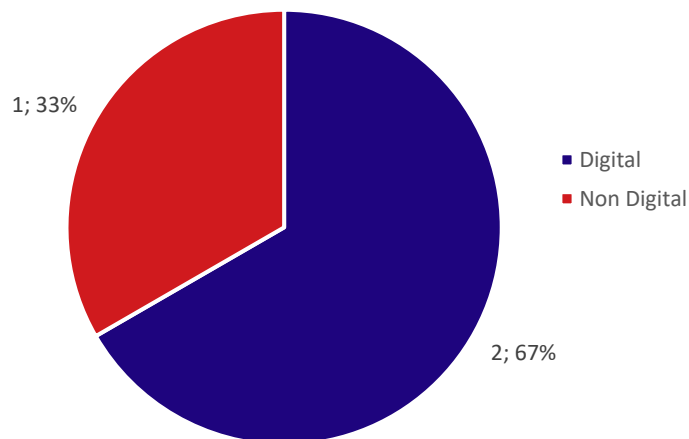
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pulang Pisau

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 2 (67%) inovasi pelayanan publik dan 1 (33%) inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

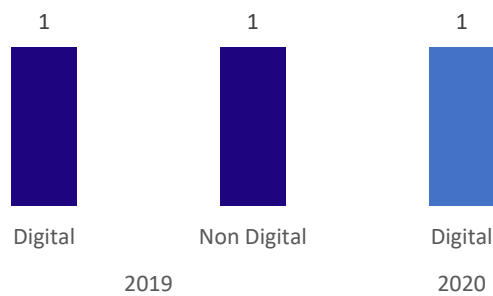
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pulang Pisau

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 2 (66.67%) dari 3 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Pulang Pisau merupakan inovasi digital, kemudian 1 (33.33%) inovasi merupakan inovasi non digital.

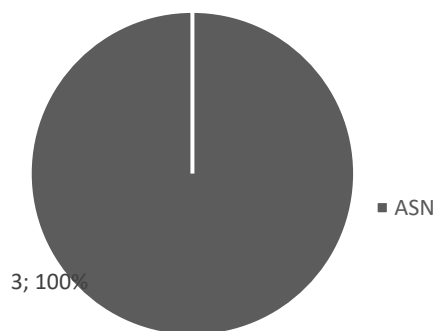
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Pulang Pisau

Secara umum jumlah inovasi dari tahun 2019 ke tahun 2020 tidak mengalami perubahan, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital dan non digital pada tahun 2019 masing-masing berjumlah 1 inovasi, lalu pada tahun 2020 hanya terdapat 1 inovasi digital. Demikian pula dengan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada.

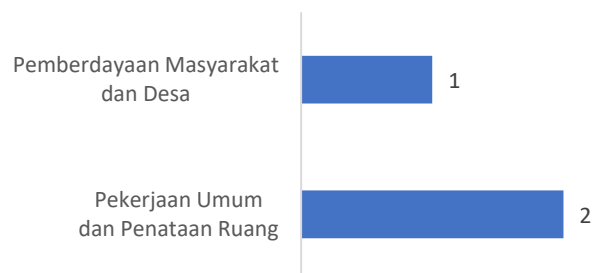
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pulang Pisau

Seluruh inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN, yaitu sejumlah 3 inovasi.

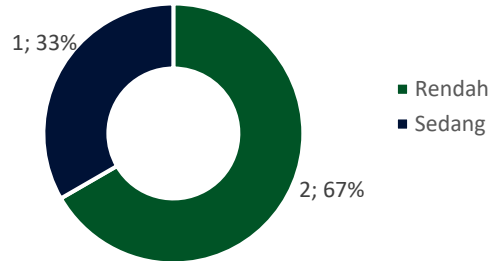
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pulang Pisau

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan urusan pemerintahan hanya pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 1 inovasi, sedangkan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 2 inovasi.

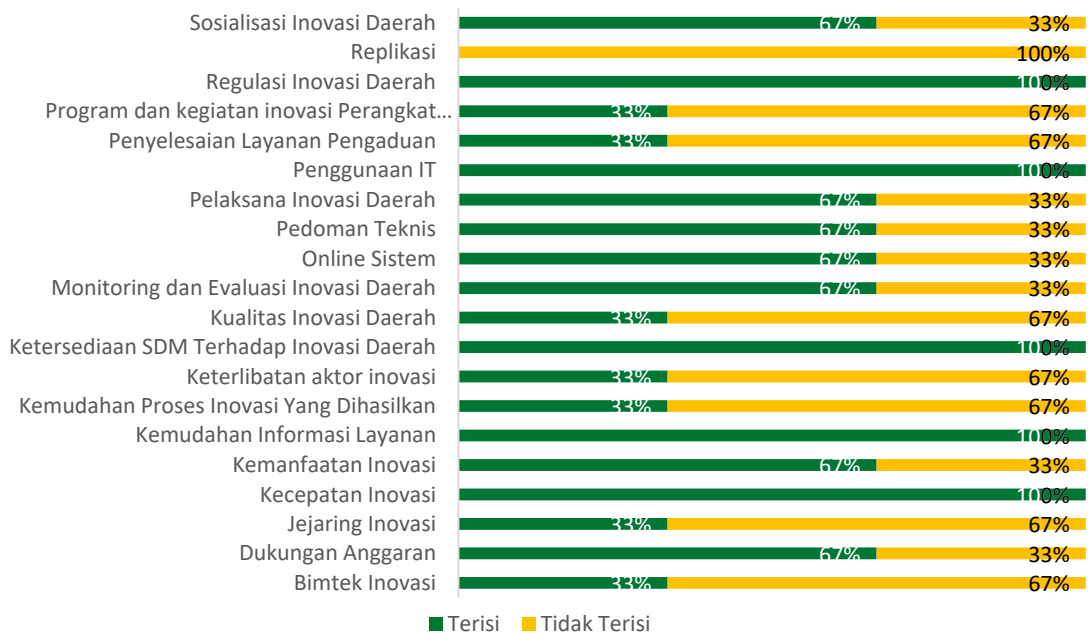
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Pulang Pisau

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, 2 dari 3 inovasi masih termasuk dalam skor kematangan rendah, sedangkan 1 inovasi lainnya sudah termasuk dalam skor sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

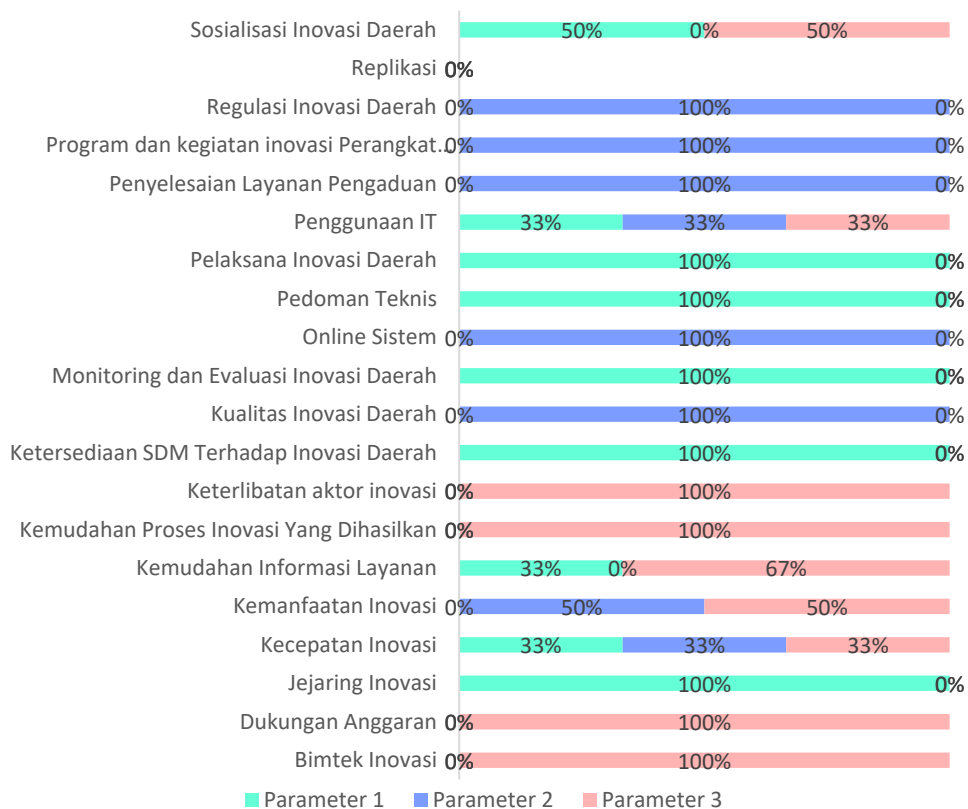
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Dari 3 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pulang Pisau, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 40% sedangkan 60% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, dan Kecepatan Inovasi merupakan indikator-indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 100% artinya 3 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pulang Pisau telah terisi data pendukung pada kedua indikator-indikator tersebut. Sedangkan beberapa indikator memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung 67% dan 33%, yaitu masing-masing ada 7 indikator. Sementara itu pada indikator Replikasi tidak terdapat data pendukung yang terisi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Dukungan Anggaran, dan Bimtek Inovasi masing-masing sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Online Sistem, dan Kualitas Inovasi Daerah masing-masing sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Sedangkan indikator-indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang

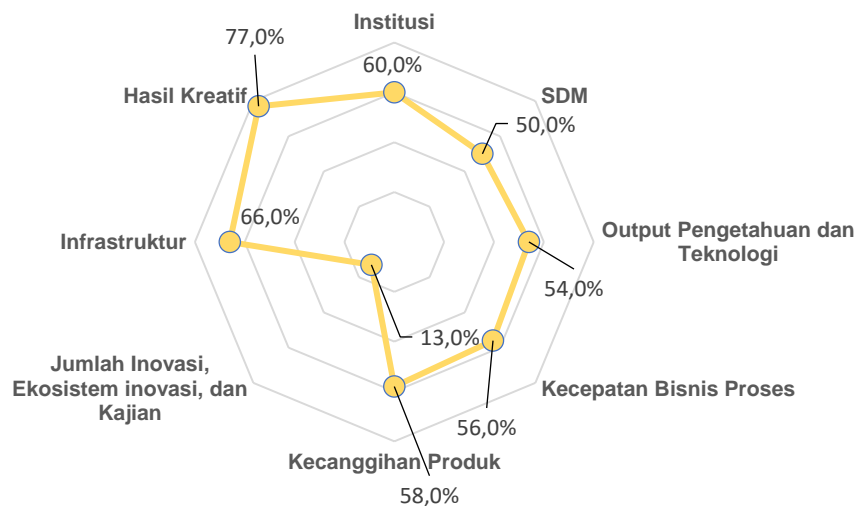
tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, dan indikator Jejaring Inovasi masing-masing sebesar 100%.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Pulang Pisau beserta Skor Kematangannya

Tabel 10. Daftar Inovasi Kabupaten Pulang Pisau beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Bengkel Tanaman (BETMAN)	12
PAHARI Mobile	62
RIMBANG	8

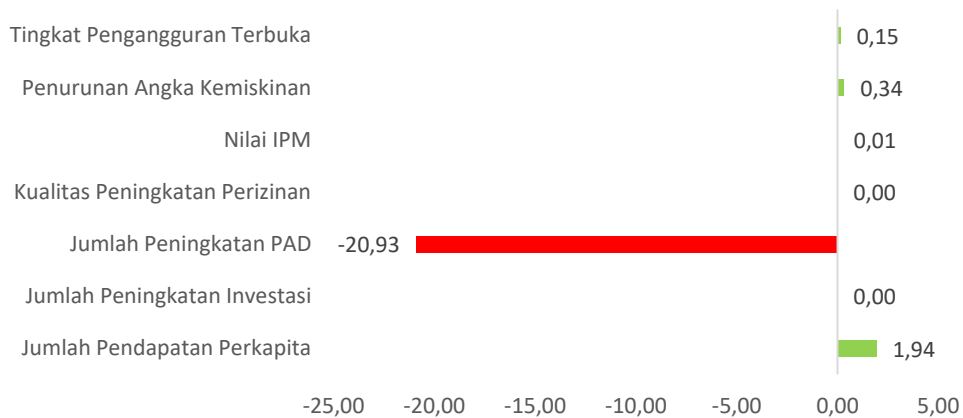
L. KABUPATEN SERUYAN



Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Seruyan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Seruyan memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 77.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Selanjutnya, variabel Infrastruktur (66%), Institusi (60%), Kecanggihan Produk (58%), Kecepatan Bisnis Proses (56%), Output Pengetahuan dan Teknologi (54%), dan SDM (50%) memiliki skor yang termasuk pada parameter 2. Sedangkan skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 13% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

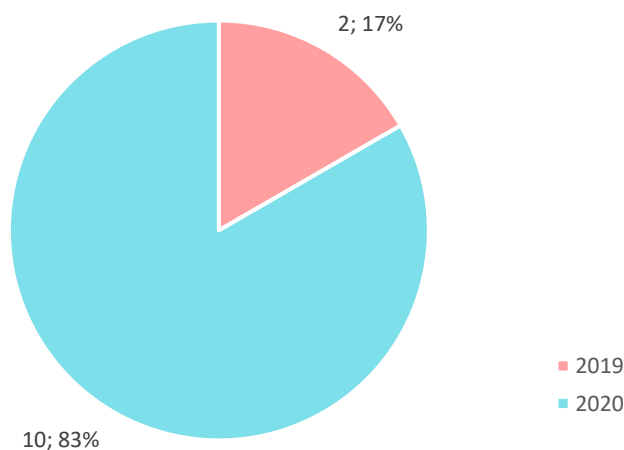


Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Seruyan

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.15%, di mana peningkatan angka tersebut artinya jumlah pengangguran semakin bertambah. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan, nilai IPM tidak menunjukkan perubahan yang signifikan meskipun mengalami peningkatan yang positif. Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Seruyan meningkat sebesar 1.94%. Sementara itu, indikator Jumlah Peningkatan PAD yang menurun secara signifikan sebesar 20.93% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%. Indikator Kualitas Perizinan dan Jumlah Peningkatan Investasi tidak mengalami perubahan.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

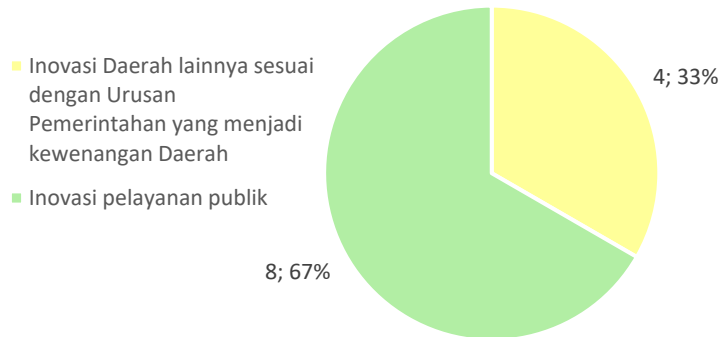


Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Seruyan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Seruyan telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 2 (16.67%) inovasi dari 12 inovasi yang dilaporkan

tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 10 (83,33%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

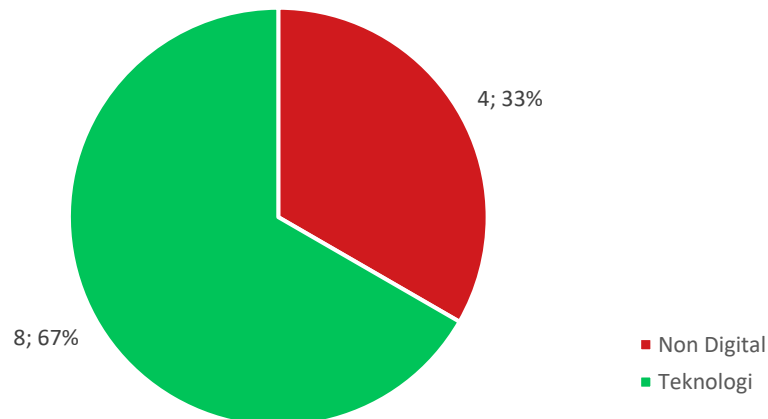
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Seruyan

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi inovasi didominasi oleh inovasi pelayanan publik, yaitu terdapat 8 (67%) inovasi sedangkan inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebanyak 4 (33,33%) inovasi.

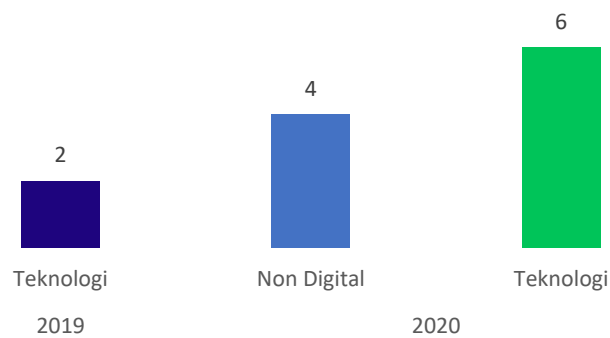
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Seruyan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 8 (66.67%) dari 12 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Seruyan merupakan inovasi teknologi, kemudian 4 (33.33%) inovasi merupakan inovasi non digital.

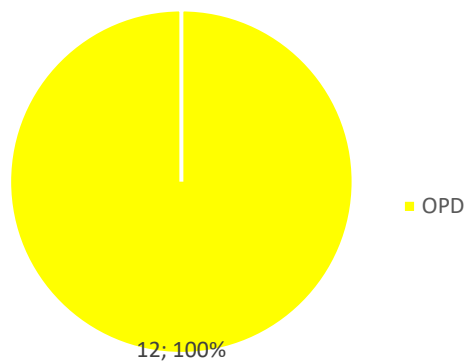
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Seruyan

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, terutama pada inovasi teknologi. Dapat dilihat bahwa inovasi teknologi meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi dan pada tahun 2020 naik menjadi 6 inovasi. Selain itu pada tahun 2020 terdapat 4 inovasi non digital, di mana sebelumnya tidak terdapat inovasi non digital.

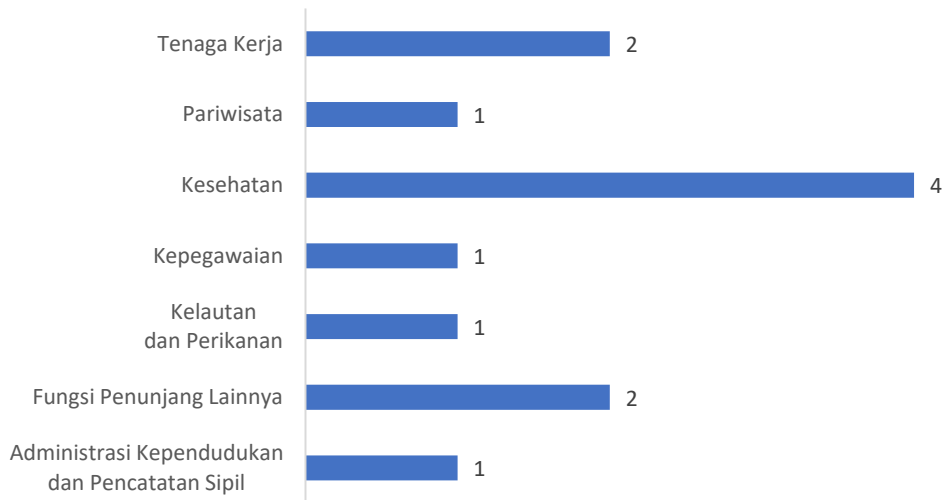
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Seruyan

Sluruh inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Seruyan pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sejumlah 12 inovasi. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

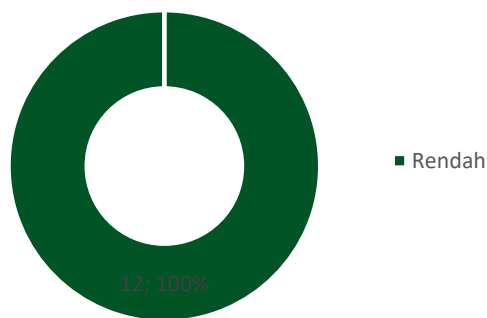
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Seruyan

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Seruyan berdasarkan urusan pemerintahan cukup bervariasi. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan Kesehatan dengan 4 inovasi dari 12 inovasi yang dilaporkan. Untuk inovas-inovasi pada urusan Pariwisata, Kepegawaian, Kelautan dan Perikanan, dan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil masing-masing hanya 1 inovasi. Sedangkan untuk urusan Tenaga Kerja dan Fungsi Penunjang Lainnya masing-masing sebanyak 2 inovasi.

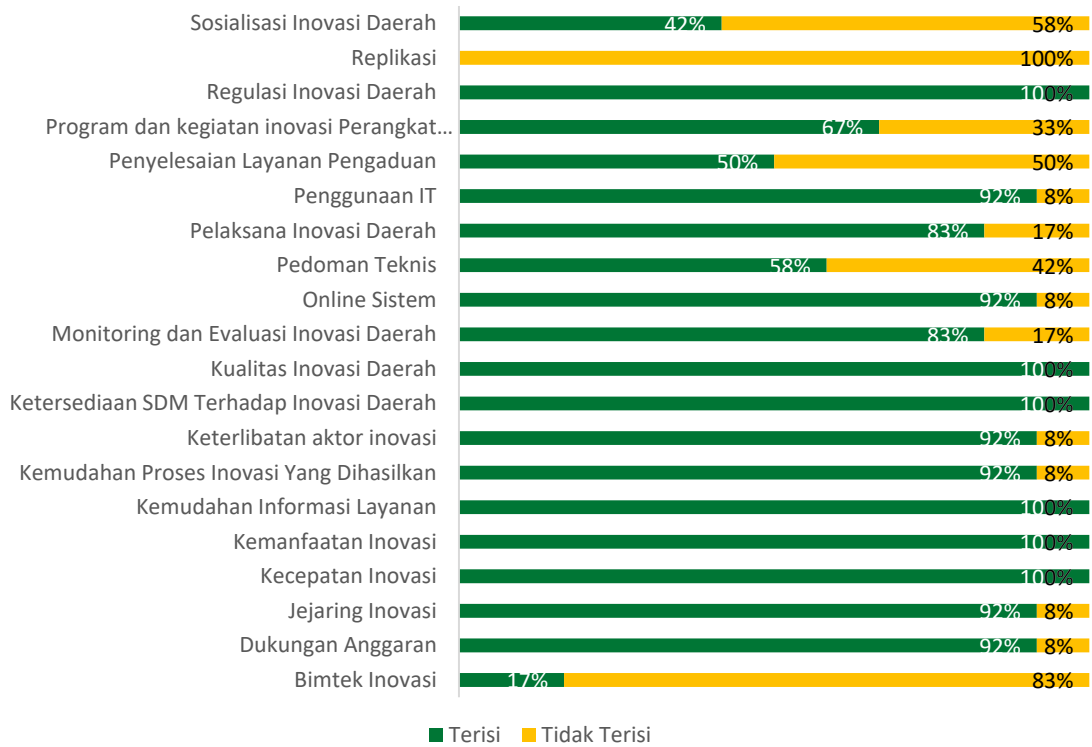
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Seruyan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan Kabupaten Seruyan, yaitu 12 inovasi masih dalam kategori skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

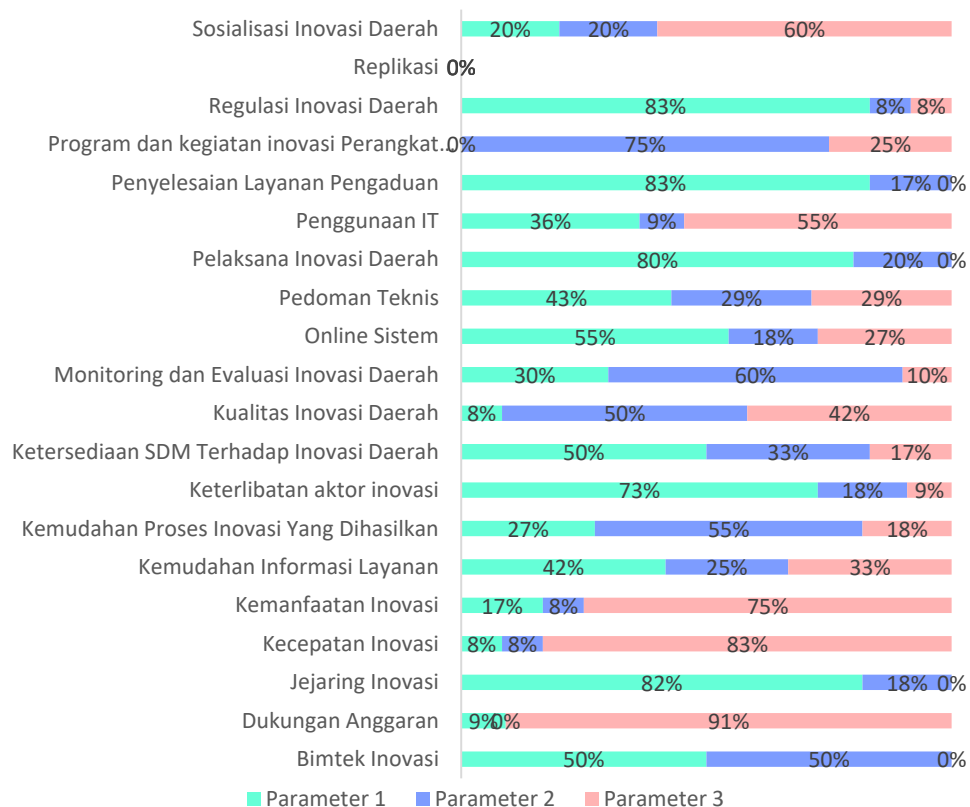
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan

Dari 20 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Seruyan, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 22,5% sedangkan 77,5% lainnya telah terisi data pendukung. Terdapat 6 indikator yang memiliki tingkat keterisian 100%, yaitu indikator Regulasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, dan Kecepatan Inovasi. Artinya dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Seruyan telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu tidak ada data pendukungnya, yaitu 0% dan indikator dengan tingkat keterisian terendah kedua adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 17%.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran sebesar 91%, artinya 91% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Dukungan Anggaran termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKP, yaitu sebesar 75% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi terdapat 2 indikator, yaitu Regulasi Inovasi Daerah dan Penyelesaian Layanan Pengaduan yang masing-masing sebesar 83%. Sementara itu, tidak terdapat data yang terisi pada indikator Replikasi.

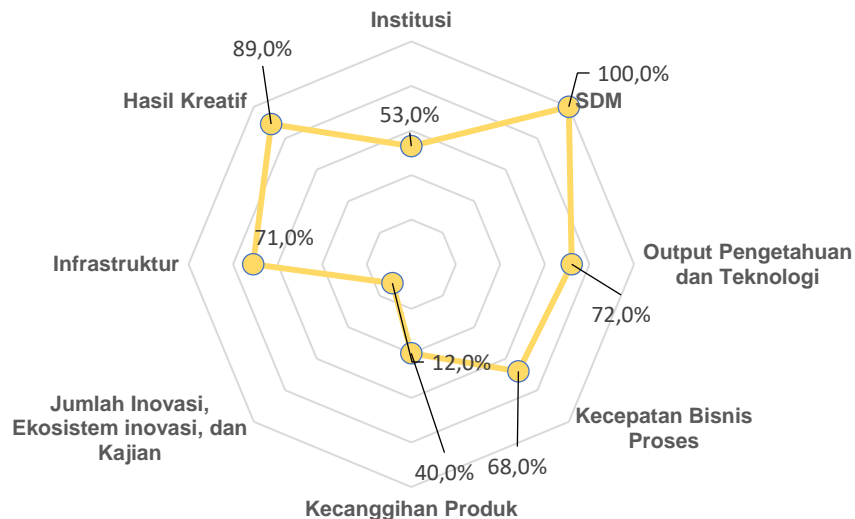
j. Daftar Inovasi Kabupaten Seruyan beserta Skor Kematangannya

Tabel 11. Daftar Inovasi Kabupaten Seruyan beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Inovasi Daerah pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan	45
APLIKASI PENGADUAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ONLINE (PAHARI)	27
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETENAGAKERJAAN BLK KABUPATEN SERUYAN	31
SISTEM ADMINISTRASI KELURAHAN KUALA PEMBUANG DUA KABUPATEN SERUYAN	31

DESA WISATA KREATIF BANGUN HARJA	15
PEMBENIHAN IKAN BELIDA DI BALAI BENIH IKAN TELAGA PULANG KABUPATEN SERUYAN	28
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR KABUPATEN SERUYAN	10
PUSKESMAS KUALA PEMBUANG II KABUPATEN SERUYAN	10
PUSKESMAS KUALA PEMBUANG I KABUPATEN SERUYAN	10
RELIGI (Resep Elektronik Digitalisasi) RSUD KUALA PEMBUANG KAB. SERUYAN	10
Pelayanan Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Seruyan (BOT SITANGKAS)	5
E-LABORATORIUM PADA RSUD KUALA PEMBUANG KABUPATEN SERUYAN	10

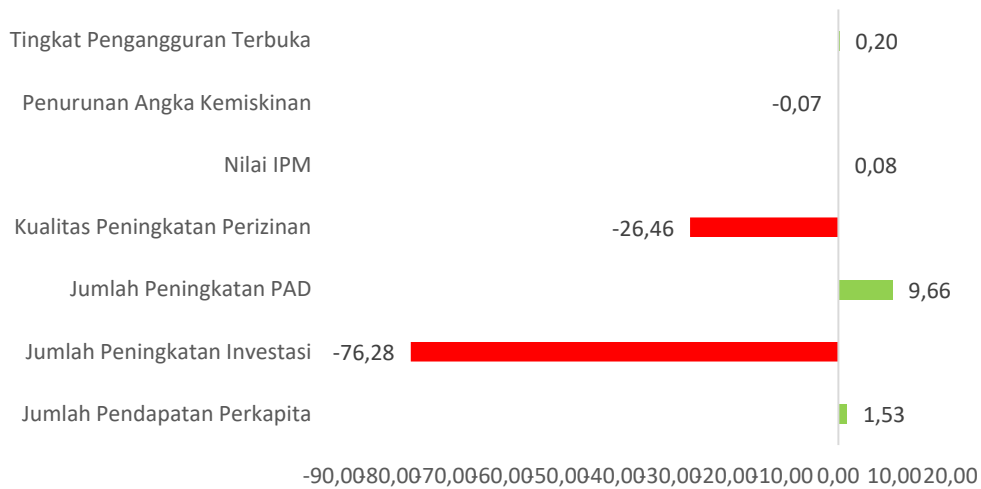
M. KABUPATEN SUKAMARA



Gambar 111. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sukamara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sukamara memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu 100%, selanjutnya diikuti oleh variabel Hasil Kreatif sebesar 89%, Output Pengetahuan dan Teknologi sebesar 72%, Infrastruktur sebesar 71%, dan Kecepatan Bisnis Proses 68%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel-variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Selanjutnya yang termasuk pada skor parameter 2 terdapat dua variabel, yaitu variabel Institusi (53%) dan Kecanggihan Produk (40%). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian merupakan yang terendah, yaitu 12% dimana secara umum capaian skor indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

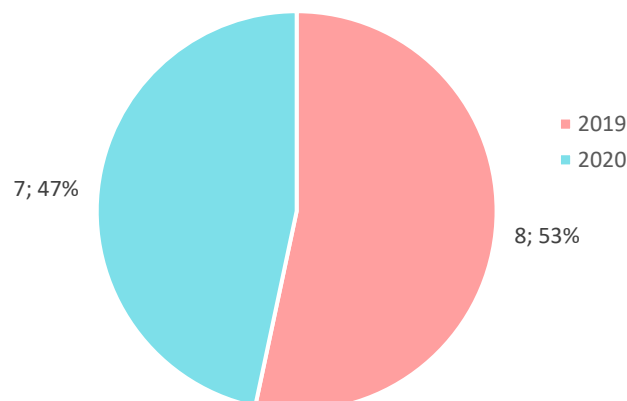


Gambar 112. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sukamara

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Data menunjukkan adanya penurunan signifikan pada indikator Jumlah Peningkatan Investasi, yaitu sebesar 76.28% dan indikator Kualitas Peningkatan Perizinan, yaitu sebesar 26.46%. Selanjutnya, indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan sebesar 9.66%, angka tersebut sudah melebihi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 8%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita juga meningkat sebesar 1.53%. Sedangkan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM tidak mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun demikian, nilai IPM tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

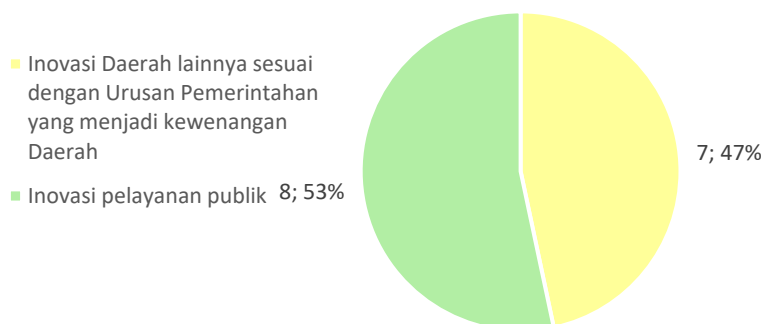
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sukamara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sukamara telah diterapkan pada tahun 2019 dan 2020 kurang lebih sama rata. Terdapat 8 (53.33%) inovasi dari 15 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 7 (46,67%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

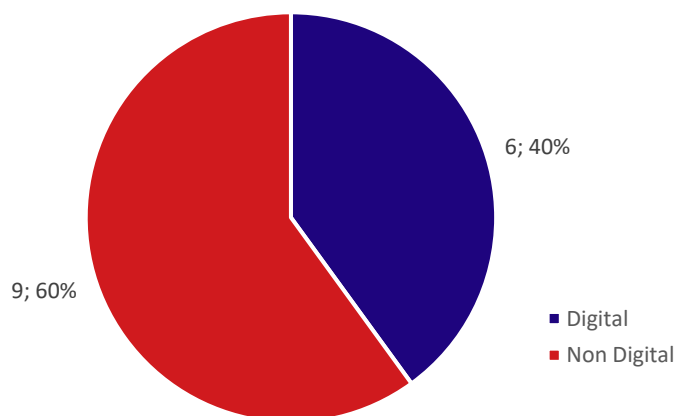
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sukamara

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya hampir seimbang, yaitu terdapat 8 (53%) inovasi pelayanan publik dan 7 (47%) inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

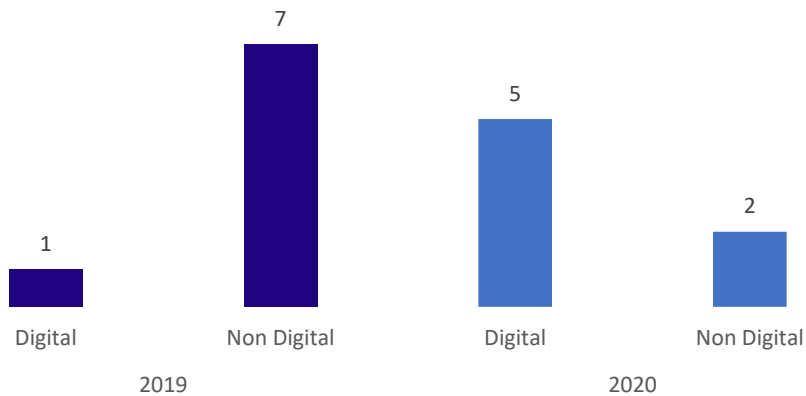
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 115. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sukamara

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 9 (60%) dari 15 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Sukamara merupakan inovasi non digital, kemudian 6 (40%) inovasi merupakan inovasi digital.

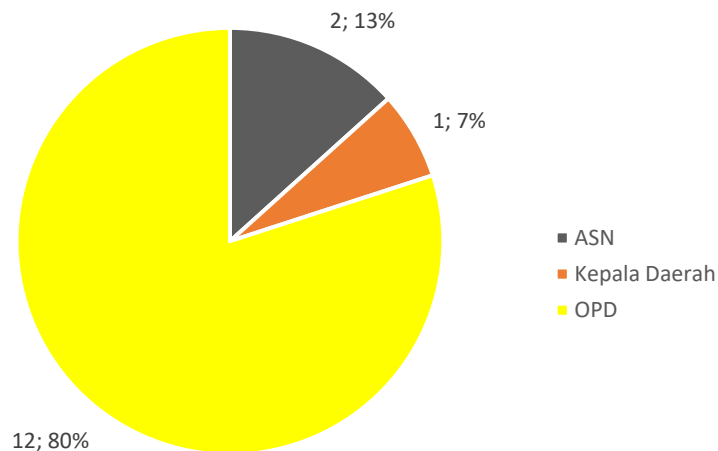
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 116. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sukamara

Jumlah inovasi digital yang dilaporkan Kabupaten Sukamara mengalami penambahan cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yang semula hanya 1 inovasi pada tahun 2019, lalu bertambah menjadi 5 inovasi pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah inovasi non digital justru sebaliknya, yaitu mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah inovasi non digital pada tahun 2019 sebanyak 7 inovasi, lalu menurun pada tahun 2020 menjadi 2 inovasi.

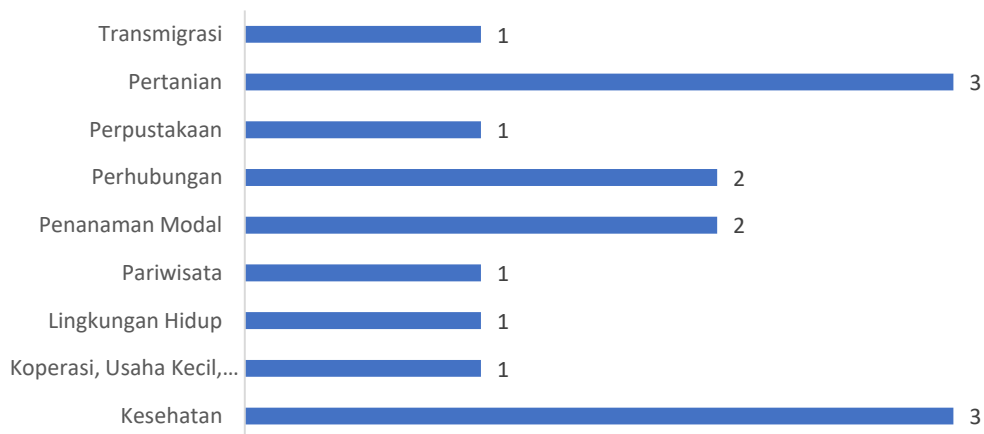
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 117. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sukamara

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sukamara pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 12 (80%) inovasi sementara 2 (13.33%) lainnya diinisiasi oleh ASN. Selanjutnya, ada 1 (6.67%) inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah.

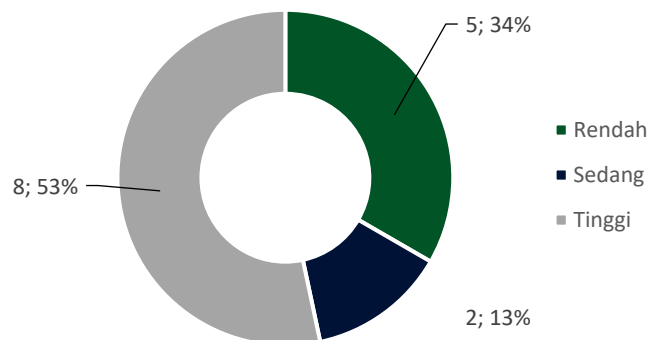
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 118. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sukamara

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Sukamara berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan Pertanian dan Kesehatan dengan masing-masing berjumlah 3 inovasi. Selanjutnya terdapat masing-masing 2 inovasi pada urusan Perhubungan dan Penanaman Modal. Sedangkan untuk urusan-urusan lainnya seperti: Transmigrasi, Perpustakaan, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah masing-masing terdapat 1 inovasi.

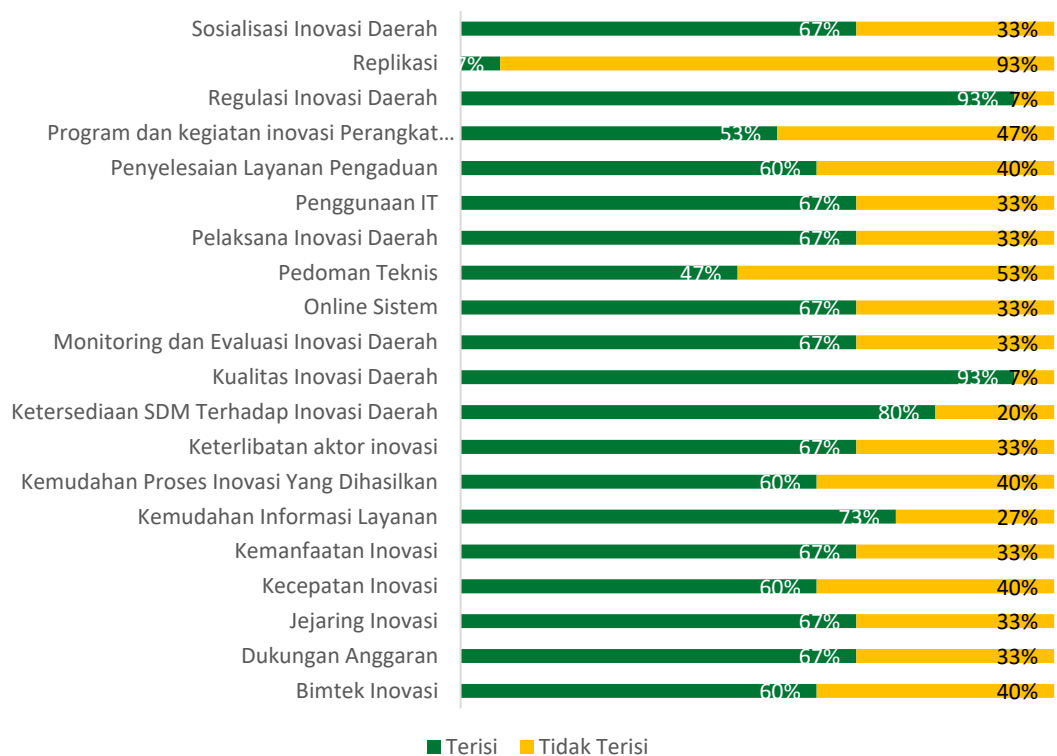
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 119. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sukamara

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi, yaitu sejumlah 8 (53%) inovasi. Selain itu, terdapat 2 (13%) inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang dan 5 (34%) inovasi yang memiliki skor rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

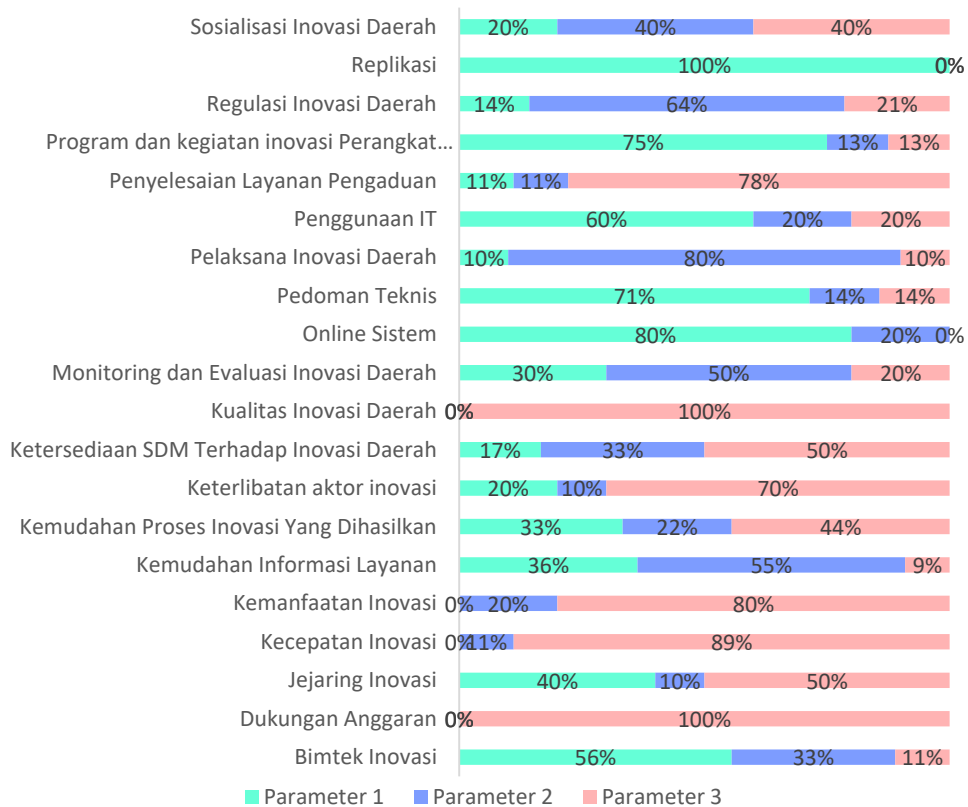
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sukamara

Dari 15 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sukamara, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 35.67% sedangkan 64.33% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Kemanfaatan Inovasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 93% artinya 13 dari 15 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sukamara telah terisi data pendukung pada kedua indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 7% artinya hanya 2 dari 15 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 121. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah dan Dukungan Anggaran, yaitu masing-masing sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada dua indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 80% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Replikasi.

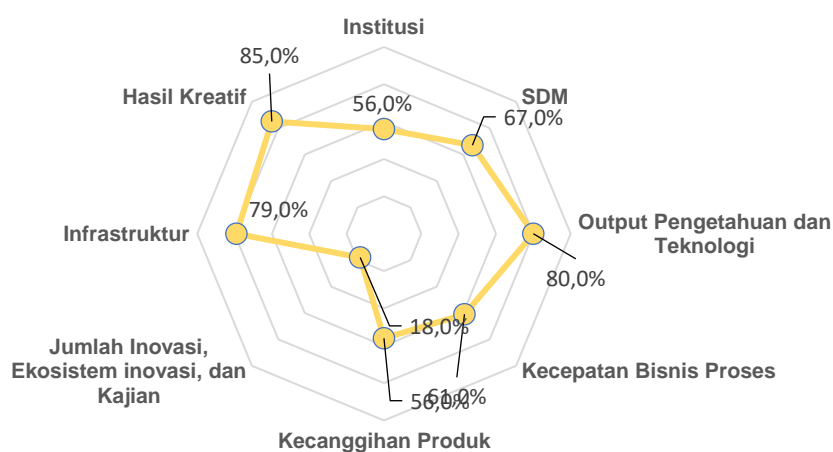
j. Daftar Inovasi Kabupaten Sukamara beserta Skor Kematangannya

Tabel 12. Daftar Inovasi Kabupaten Sukamara beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional	23
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Tempat Wisata	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Transportasi Umum	27

Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP	27
WEB SMALL BUSINESS INFORMASI INVESTASI DAERAH	103
TABASAN TRANS - DATA BASE KAWASAN TRANSMIGRASI JELAI (PULAU NIBUNG) -	109
INOVASI DAERAH MoU SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKAMARA	31
KABAN (Kerja Sama antara Bidan dan Dukun Ajak Persalinan dengan Nakes di Fasilitas Kesehatan)	91
Perlindungan Kawasan Konservasi melalui Gerakan MAHAL BERMAJU (Masyarakat Hukum Adat Lebih Bermartabat dan Maju)	107
Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Sukamara	107
SI TANGGAP (Situasi Tanggulangi Pemecahan Konflik Pemeliharaan Ternak)	109
GANGAN ASAM di PANCI (Gandeng Tangan Dasawisma di Pantai Lunci)	54
GEMA SUPER (GERAKAN MASYARAKAT SUKA PERPUSTAKAAN)	119
CERMAT (PENCEGAHAN RABIES MASYARAKAT SEHAT)	105
JAPANIS (Jaminan Pangan Aman Sehat Utuh dan Halal)	108

N. KABUPATEN PALANGKA RAYA

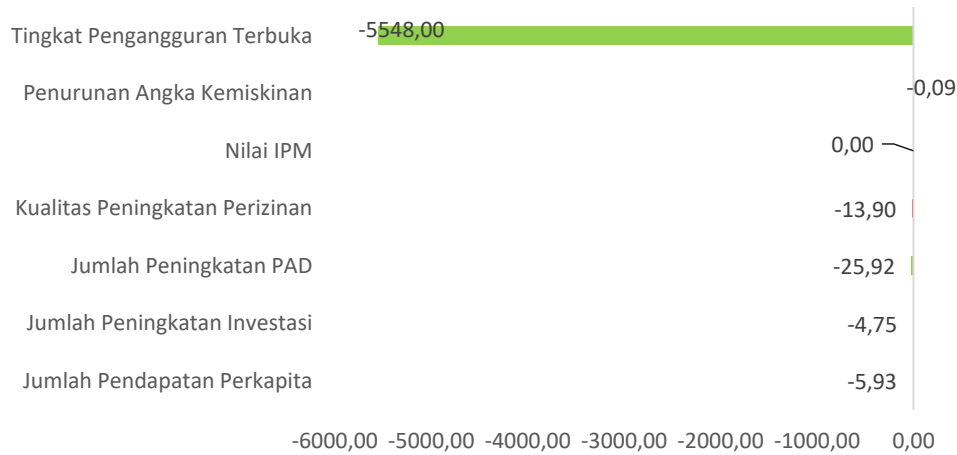


Gambar 122. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Palangka Raya

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Palangka Raya memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 80%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor

yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih sangat rendah, yaitu 18% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



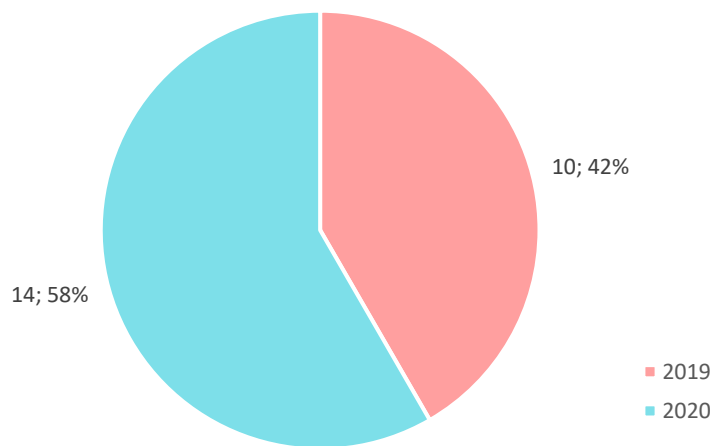
Gambar 123. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Palangka Raya

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Data pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tidak sesuai dengan yang diminta, karena melebihi jumlah maksimum persentase yang seharusnya. Selanjutnya, indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 13.90% dimana nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan PAD yang menurun sebesar 25.92% dimana angka tersebut sangat jauh dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%. Pemerintah Kabupaten Palangka Raya juga mengalami penurunan cukup jauh pada Jumlah Investasi sebesar 4.75%, dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%.

Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Palangka Raya menurun sebesar 5.93%, nilai tersebut masih berada di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%. Demikian pula dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada pada angka 0,% dimana nilai tersebut sama dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Terakhir, indikator Penurunan Angka Kemiskinan pada Kabupaten Palangka Raya menurun sebesar 0.09%, artinya jumlah angka kemiskinan mengalami pertambahan.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

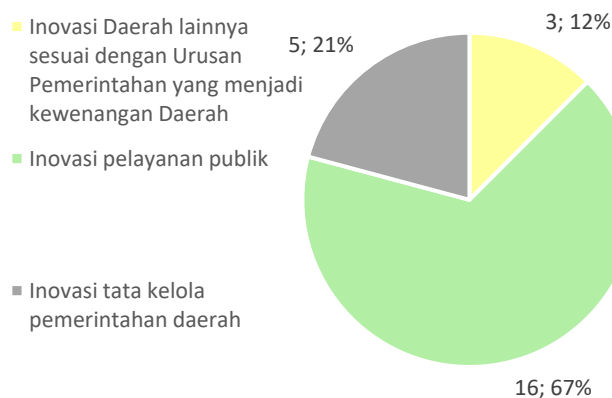
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 124. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Palangka Raya

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Palangka Raya yang telah diterapkan sejak tahun 2019, terdapat 10 (41.67%) inovasi dari 24 inovasi yang dilaporkan. Selanjutnya terdapat 14 (58.33%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

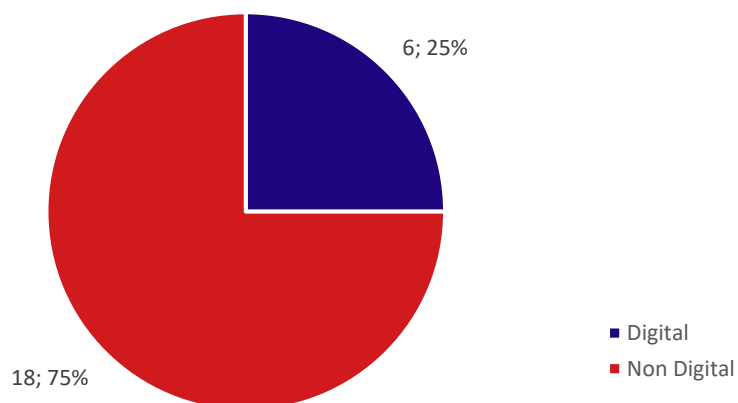
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 125. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Palangka Raya

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 16 (67%) inovasi pelayanan publik, 5 (21%) inovasi tata Kelola pemerintahan daerah, dan 3 (12%) inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

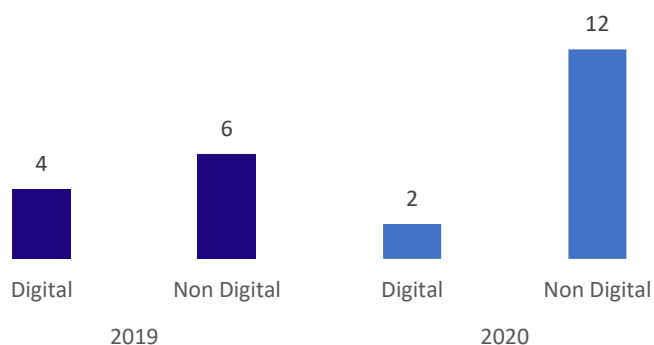
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 126. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Palangka Raya

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 18 (75%) dari 24 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Palangka Raya merupakan inovasi non digital, kemudian 6 (25%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

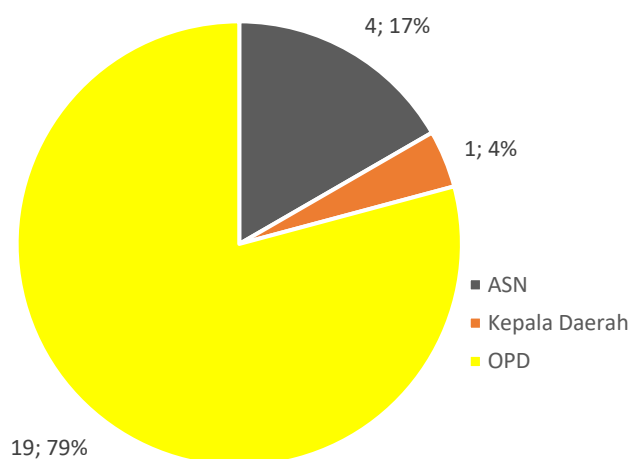
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 127. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Palangka Raya

Dapat dilihat bahwa inovasi digital mengalami penurunan di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 4 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 2 inovasi. Sedangkan inovasi non digital mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 6 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 12 inovasi.

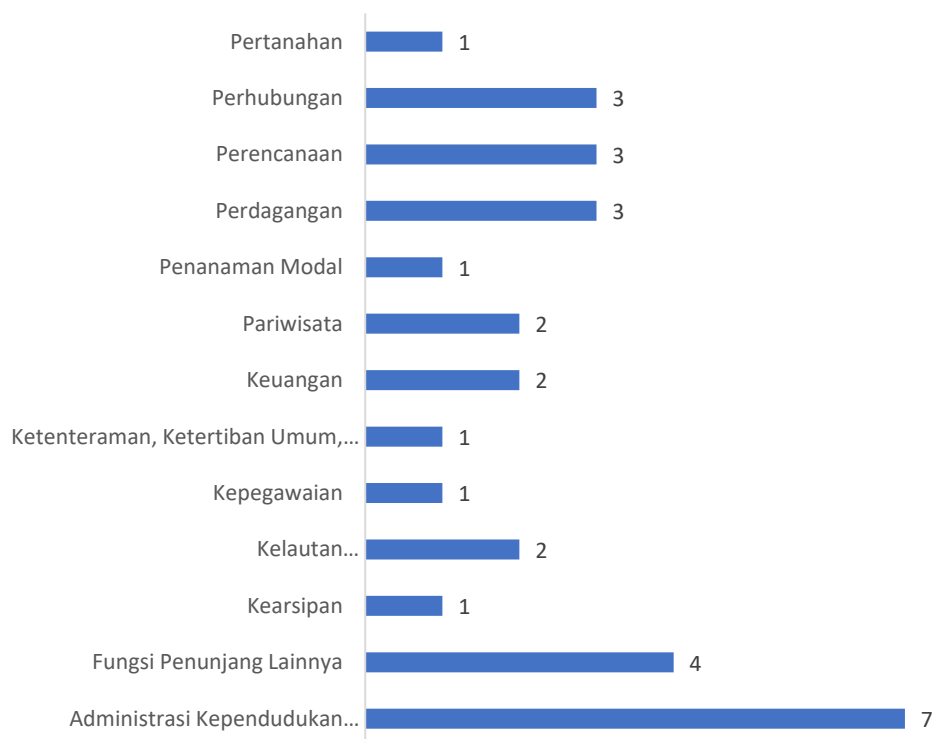
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 128. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Palangka Raya

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Palangka Raya pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sejumlah 19 (79.17%) inovasi sementara 4 (16.67%) lainnya diinisiasi oleh ASN. Sedangkan 1 (4.17%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

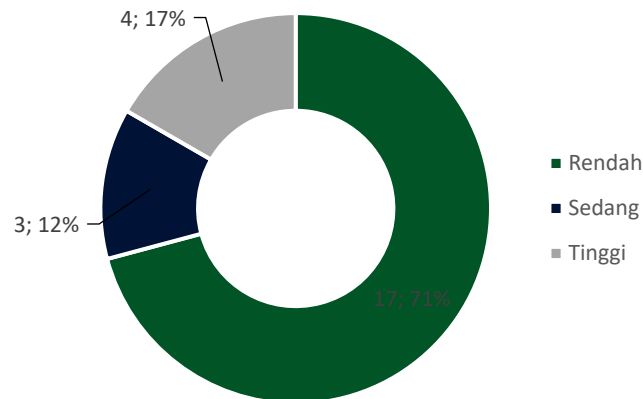
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 129. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Palangka Raya

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Palangka Raya berdasarkan urusan pemerintahan cukup bervariasi. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 7 inovasi yang dilaporkan. Selanjutnya, urusan Perhubungan, Perencanaan, dan Perdagangan masing-masing terdapat 3 inovasi. Sedangkan untuk urusan Pariwisata, Keuangan, dan Kelautan & Perikanan masing-masing terdapat 2 inovasi. Urusan Pertahanan, Penanaman Modal, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepegawaian, dan Kearsipan masing-masing 1 inovasi. Terdapat 4 inovasi untuk urusan Fungsi Penunjang Lainnya.

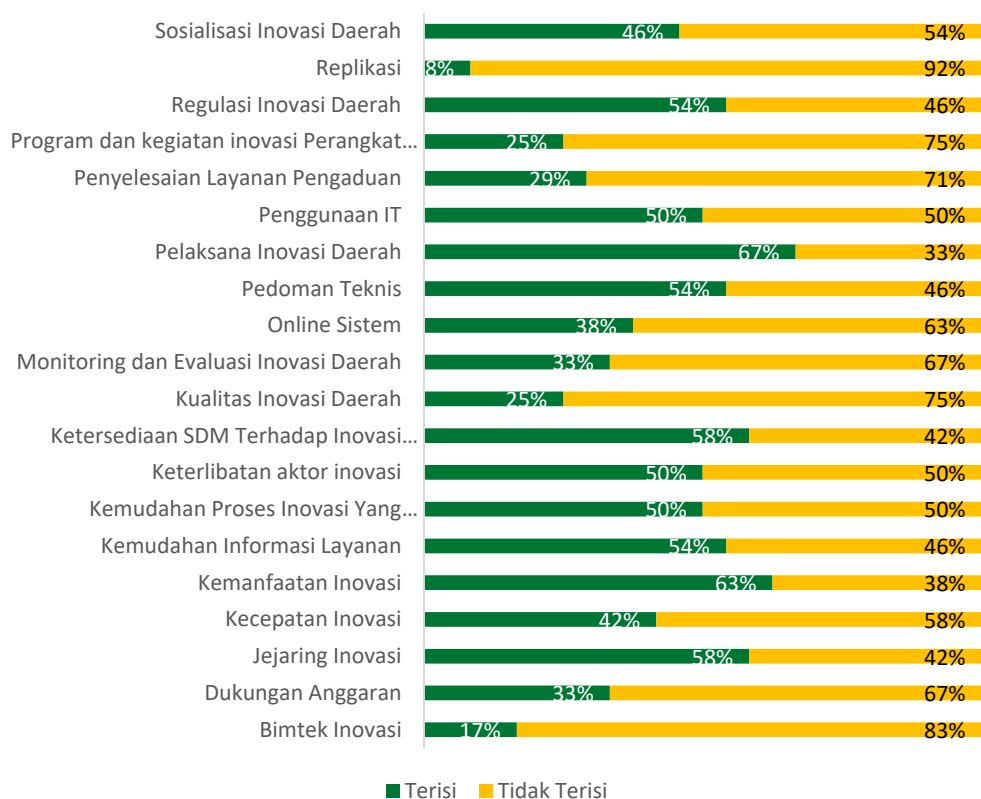
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 130. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Palangka Raya

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi masih pada skor kematangan rendah, yaitu sejumlah 17 (71%) inovasi. Selain itu, terdapat 4 (17%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi dan 3 (12%) inovasi lainnya memiliki skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

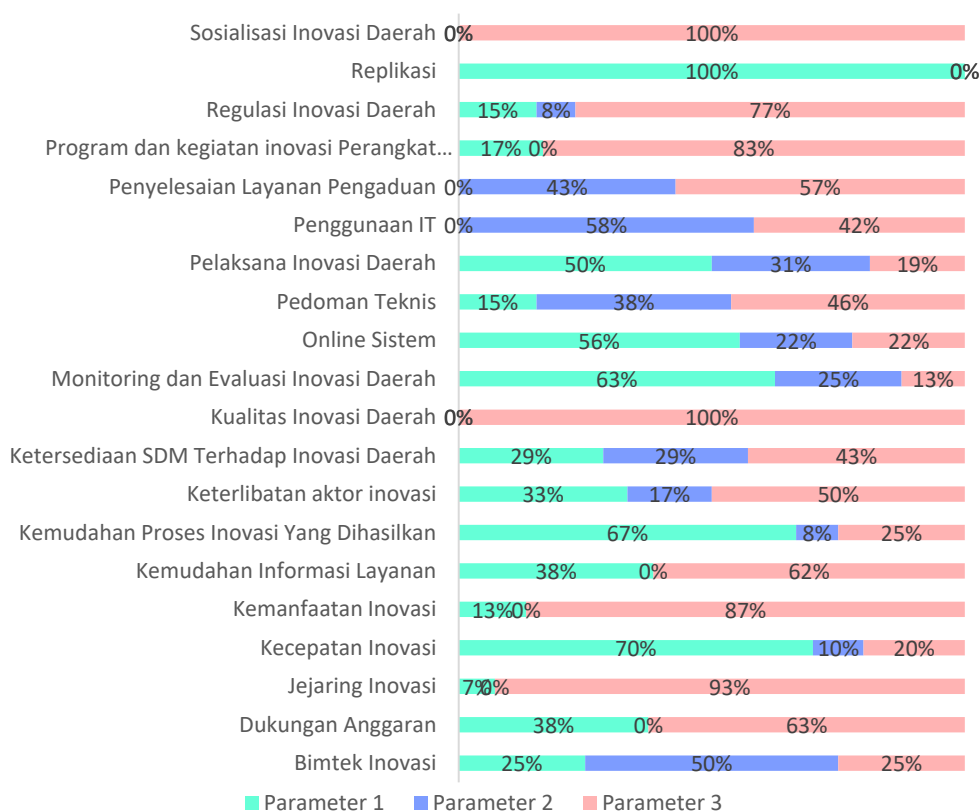
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 131. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Palangka Raya

Dari 24 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Palangka Raya, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 57.29% sedangkan 42.71% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Pelaksana Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 67% artinya 16 dari 24 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Palangka Raya telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 8% artinya hanya 1 dari 24 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 132. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah masing-masing sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada kedua indikator termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Penggunaan IT sebesar 58% artinya 58% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Replikasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Palangka Raya beserta Skor Kematangannya

Tabel 13. Daftar Inovasi Kabupaten Kapuas beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Penataan Pasar Sore dan Pasar Subuh bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Palangka Raya	28
Pengawasan Pasar Modern	29
Menuju Tataan Normal Baru di Sektor Pariwisata	39
Menuju Tataan Normal Baru di Sektor Hotel	19

Menuju Tatanan New Normal pada Sektor Restoran	19
Menuju Tatanan New Normal dalam Pelayanan Publik	31
Pos Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Transportasi Manusia secara Humanis	57
Jaring Musrenbang (Jaminan Aspirasi melalui Skoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan)	88
Pemberdayaan masyarakat Nelayan tradisional Dalam Pemanfaat Beje yang diintegrasikan dengan Padi Lahan Rawa di Kelurahan Tanjung Pinang	0
KLINIK APBD	113
si-LaNciP	132
Pengelolaan Sumber Daya Induk Ikan Gabus (Behau) di Alam Wilayah Perairan Umum Kota Palangka Raya	11
DISKON KIA	0
NASI UDUK (Informasi dan Pengaduan Adminduk Terpadu)	0
PERSAMI (Perekaman KTP-el Sabtu Minggu)	0
LAUK SUNGEI" --> Layanan Adminduk Susur Sungai	0
DUKCAPIL NGE-MALL (Layanan Adminduk di Mall) Gerai Palma	0
DEMEN DUDUK (Delivery Service Dokumen Kependudukan)	0
DUMAS POL PP (Pelayanan Pengaduan Masyarakat)	72
Aplikasi Web Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Palangka Raya	118
Pengarsipan Berbasis Komputerisasi di Kelurahan Bereng Bengkel	0
Pembuatan Surat Tanah di Kelurahan Panarung dengan Menyertakan Kode QR	0
Pos Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Transportasi Manusia secara Humanis	43
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Palangka Raya	116

The Page Left is Blank



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 14 Kabupaten/Kota namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

A. KABUPATEN BARITO SELATAN

Kabupaten Barito Selatan memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 0,56 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Barito Selatan melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

B. KABUPATEN BARITO TIMUR

Kabupaten Barito Timur memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 16,17 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Barito Timur melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

C. KABUPATEN BARITO UTARA

Kabupaten Barito Utara memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 9,00 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Barito Utara melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

D. KABUPATEN GUNUNG MAS

Kabupaten Gunung Mas memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 9,40 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Gunung Mas melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

E. KABUPATEN KAPUAS

Kabupaten Kapuas memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 22,53 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kapuas melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

F. KABUPATEN KATINGAN

Kabupaten Katingan memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 33,12 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Katingan melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

G. KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Kabupaten Kota Waringin Barat memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 53,49 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kota Waringin Barat melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

H. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 46.60 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kota Waringin Timur melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

I. KABUPATEN LAMANDAU

Kabupaten Lamandau memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 31,54 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Lamandau melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

J. KABUPATEN MURUNG RAYA

Kabupaten Murung Raya memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 20,59 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Murung Raya melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

K. KABUPATEN PULANG PISAU

Kabupaten Pulang Pisau memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 19,59 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Pulang Pisau melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah

L. KABUPATEN SERUYAN

Kabupaten Seruyan memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 22,29 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Seruyan melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

M. KABUPATEN SUKAMARA

Kabupaten Sukamara memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 44,67 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sukamara melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

N. KOTA PALANGKARAYA

Kota Palangkaraya memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 30,37 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Palangkaraya melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.